

UPAYA PEMBERDAYAAN DESA WISATA EDUKASI BERBASIS BUMDES

UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KEWIRAUSAHAAN DI DESA

HENDROSARI, KECAMATAN MENGANTI, KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Oleh:

GITA SONYA

NIM: G71217069



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Gita Sonya

NIM : G71217069

Fakultas / Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : UPAYA PEMBERDAYAAN DESA WISATA EDUKASI
BERBASIS BUMDES UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI
KEWIRAUSAHAAN DI DESA HENDROSARI, KECAMATAN
MENGANTI, KABUPATEN GRESIK

Dengan ini bersungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Mei 2022

Saya Menyatakan,



10000
REPUBLIK INDONESIA
METRA
TEMP
GITA SONYA

NIM: G71217069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Gita Sonya, NIM G71217069 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Gresik, 13 Mei 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line, positioned above the printed name and NIP.

Hanafi Adi Putranto, S.Si.,SI
NIP. 1982090520150310

Pembimbing

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Gita Sonya dengan NIM.G71217069 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Ekonomi.

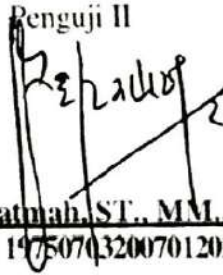
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



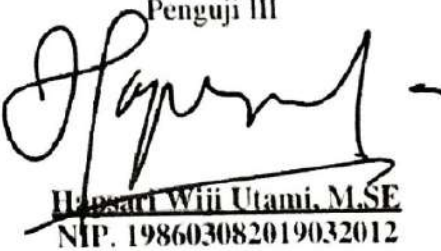
Hanafi Adi Putranti, S.Si., SE., M.Si
NIP. 198209052015031002

Penguji II



Dr. Hj. Fatmah, ST., MM., RSA
NIP. 197507032007012020

Penguji III



Hapsari Wiji Utami, M.SE
NIP. 198603082019032012

Penguji IV



Abdullah Kafabih, S.EI, M.S.E
NIP. 199108072019031006

Surabaya, 07 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Saiful Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 1970051420000310014



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gita Sonya
NIM : G71217069
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi Bisnis/Ilmu Ekonomi
E-mail address : gitasonya021@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

UPAYA PEMBERDAYAAN DESA WISATA EDUKASI BERBASIS BUMDES UNTUK

MENINGKATKAN EKONOMI KEWIRAUSAHAAN DI DESA HENDROSARI,

KECAMATAN MENGANTI, KABUPATEN GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juni 2023

Penulis

(Gita Sonya)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Upaya Pemberdayaan Desa Wisata Edukasi Berbasis BUMDes Untuk Meningkatkan Ekonomi Kewirausahaan Di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik”. Ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses pemberdayaan masyarakat, faktor apa saja yang mempengaruhi Peningkatan Perekonomian dan Desa serta Ekonomi wirausahaan dan bagaimana keadaan Ekonomi masyarakat lontar sewu desa hendrosari pra adanya desa wisata dan pasca adanya desa wisata.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden untuk memperoleh data pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa hendrosari, kecamatan menganti, kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis datanya menggunakan reduksi data dan display data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes sebelum wisata Lontar Sewu adalah dengan berfokus pada pelatihan dan pengembangan produk dari Legen menjadi memiliki turunan lain seperti permen dan lainnya. Faktor yang mempengaruhi peningkatan perekonomian dan desa, pada saat sebelum adanya wisata Lontar Sewu bahwa faktor yang memiliki pengaruh pada ekonomi desa adalah transaksi penjualan Legen dan Towak saja. Akan tetapi, pada saat setelah ada wisata Lontar Sewu faktor yang mempengaruhi ekonomi desa. Keadaan ekonomi masyarakat lontar sewu desa Hendrosari, ketika sebelum adanya wisata Lontar Sewu bahwa kondisi desa memiliki populasi pengangguran, ibu rumah tangga tidak memiliki kegiatan produktif, masyarakat tidak mengenal kegiatan wirausaha, dan warga desa tidak banyak yang menjadi pemilik usaha. Sedangkan setelah wisata Lontar Sewu ada memunculkan perubahan yakni terbukanya lapangan kerja yang luas, peningkatan kondisi ekonomi yang membaik bahkan naik hingga lebih dari 40 persen, warga mengenal kegiatan wirausaha, warga memiliki lapak dagangan sendiri, pendapatan tidak hanya berasal dari komoditi Legen, tingkat pendidikan menjadi membaik dikarenakan pemuda-pemudi daerah diajak untuk ikut menjadi bagian dari karyawan pengelola wisata Lontar Sewu.

Kata Kunci: Pemberdayaan Desa, Ekonomi Kewirausahaan, dan BUMDes

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	18
F. Kegunaan Hasil penelitian	18
G. Definisi Operasional	19
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	28
A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	28

1. Pengertian pemberdayaan.....	28
2. Tujuan pemberdayaan	30
3. Pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat.....	31
4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	32
5. Faktor pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat	34
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	35
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	35
2. Tujuan dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	38
3. Peranan BUMDes	39
4. Landasan Hukum BUMDes	39
5. Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	41
6. Keuangan BUMDes	43
7. Pertanggung jawaban Pelaksanaan BUMDes.....	44
8. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes.....	44
9. Pembagian keuntungan	45
C. Kewirausahaan.....	46
1. Pengertian Kewirausahaan.....	46
2. Ciri – Ciri Umum Kewirausahaan	47
BAB III DATA PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Umum BUMDes Lontar Sewu	50
1. Sejarah BUMDes Lontar Sewu	50

2. Visi dan Misi BUMDes Lontar Sewu	52
3. Struktur Organisasi BUMDes Lontar Sewu	52
4. Data Kependudukan	53
B. Pengelolaan BUMDes Lontar Sewu	53
BAB IV ANALISIS DATA	68
BAB V PENUTUP.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80
Transkrip Wawancara.....	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2. Struktur Organisasi BUMDes Lontar Sewu	52



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangatlah beraneka ragam serta beraneka macam yang tersebar di wilayah Indonesia. Bahkan ada sebagian daerah yang memang mempunyai potensi alam yang mampu dijadikan objek wisata karena potensi alam yang menunjang untuk dapat dikembangkan dan dijadikan sebuah ikon daerah. Bahkan tak jarang pula desa yang notabene ruang lingkup kecil juga memiliki potensi alam yang luar biasa jika dikembangkan bisa menjadi suatu hal yang menakjubkan bahkan juga menguntungkan bagi masyarakat sekitar desa tersebut jika pengembangan yang terstruktur dengan bagus dan terarah. Tidak hanya negara saja yang terstruktur desa pun juga begitu agar menjadi desa mandiri.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki letak geografis yang sangat subur serta sumber daya alam yang sangat melimpah, maka tak heran jika setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki keunggulan masing-masing serta keunikan tersendiri. Tak heran jika di Indonesia menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi dari berbagai Negara tak jarang pula masyarakat dari manca Negara menginginkan untuk menetap di Indonesia karena keindahan alam yang ada atau hanya sekedar berpariwisata saja.

Menurut Suwanto pariwisata merupakan suatu perubahan tempat tinggal sementara di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan untuk menghasilkan upah atau bisa dikatakan perjalanan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan atau bisa dibilang sebagai pelepas kepenatan kegiatan sehari-hari.¹ Pariwisata merupakan berbagai macam

¹ Suwanto, Gamal. 2004. Dasar-dasar pariwisata. Penerbit Andi Yogyakarta

kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha serta Pemerintah daerah (UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (revisi dari UU No. 9 Tentang Kepariwisata). Menurut Kodhyat (1998) pariwisata adalah perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lain yang bersifat sementara, yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, sebagai bentuk usaha keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya serta alam.

Desa wisata menjadi salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengurangan kemiskinan untuk membebaskan diri dari ketidakberdaya dan menumbuhkan kekuatan kemandirian. Adanya pengembangan desa wisata maka diharapkan terjadi pemerataan di semua daerah yang sesuai dengan konsep pariwisata yang ada. Di satu sisi antusiasme masyarakat serta pemerintah daerah dan pemerintah desa masuk dalam pengembangan ekonomi lokal antara perpaduan desentralisasi daerah maka dari itu pemerintah daerah memiliki kewenangan terhadap pembangunan dan pengembangan desa dibawah naungan pemerintah daerah. Desa wisata merupakan wujud kombinasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dikemas dalam suatu pola kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku sehingga menjadikan desa tersebut tujuan desa wisata.

Di Indonesia desa wisata sudah tak asing lagi dikalangan para masyarakatnya apalagi semakin maju menjadikan masyarakat semakin bisa berfikir kreatif untuk memanfaatkan potensi tersebut apalagi dengan bantuan ide anak-anak muda yang mau berkontribusi dalam pembangunan desa wisata yang lebih unggul dan memberikan dampak positif kepada warga sekitarnya maka akan sangat menguntungkan desa

maupun daerah. Handiwijoyo mendefinisikan desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang kekayaan alamnya dimanfaatkan tanpa menghilangkan suasana asri dan kesan yang mencerminkan keaslian sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, dan memiliki bangunan dan struktur tata ruang desa yang berbeda memiliki khas dan keunikan. Desa wisata memunculkan optimisme masyarakat untuk terus terinvasi dan berkreasi dan diyakini kehadiran pariwisata terbukti memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap budayanya². Ke ikut sertaan masyarakat sekitar dalam setiap tahapan kegiatan diharapkan bisa memperkuat pengetahuan, kesadaran serta kemandirian masyarakat sekitar dan *impact* kesejahteraan masyarakat sekitar dapat terwujud secara berkesinambungan³.

Kabupaten Gresik merupakan Daerah pesisir pantai dengan panjang pantai dengan panjang pantai 140 km yang terdiri dari 69 km di daratan pulau Jawa memanjang dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujung pangkah, dan Panceng serta 71 km di kecamatan Sangkapura dan tambak yang berada di pulau Bawean. Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang berpotensi berkembang pesat dalam konstelasi Surabaya metropolitan area karena posisi yang strategis terlihat dalam peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) dan peraturan daerah provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Timur 2011-2031 dimana kawasan perkotaan diarahkan sebagai pusat kegiatan nasional di provinsi Jawa Timur adalah kawasan perkotaan gerbangertosusilo (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan).

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi pariwisata yang cukup beragam di antara: Wisata alam,

² Arida I. S., & Punjani, L. K. (2017). "Kajian penyusunan kriteria-kriteria desa wisata sebagai instrumen dasar pengembangan desa wisata". Jurnal analisis pariwisata Vol. 17 No. 1

³ Raharjo, Budi. (2019) Pemrograman Android dengan Flutter. Bandung : INFORMATIKA

Peninggalan Sejarah, Wisata seni dan budaya serta wisata edukasi. Potensi kepariwisataan perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan di kabupaten Gresik.

Desa Hendrosari termasuk kedalam desa wisata yang berada di kecamatan Menganti kabupaten Gresik yang mengusung tema wisata edukasi bagi anak-anak sekolah maupun remaja bahkan tak jarang pula orang dewasa mengunjungi desa wisata Hendrosari karena tempatnya yang asri serta tumbuhan-tumbuhan yang lebat dan hijau mampu menciptakan ketenangan tersendiri hal itu menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi dan ditambahnya aksesoris tempat mengabadikan momen bersama keluarga dan adanya spot-spot yang menarik untuk foto tak jarang anak muda dan remaja mengunjungi tempat wisata tersebut apalagi sekarang warga yang ikut andil dalam kegiatan pembangunan desa wisata Hendrosari banyak yang berpikir kreatif menjadikan tempat itu semakin hari semakin bagus dan layak untuk dijadikan tempat wisata desa.

Pendekatan yang dianggap paling tepat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat salah satunya ialah melalui pembangunan sektor industri. Industri adalah suatu kegiatan usaha dalam mengolah bahan mentah yang tidak bernilai atau kurang bernilai menjadi bahan jadi atau barang yang memiliki nilai jual lebih sehingga menghasilkan keuntungan bagi pengelolanya⁴. Sebelum adanya BUMdes, kondisi sosial masyarakat di desa masih kekurangan. Banyaknya masyarakat yang menjadi buruh di desa tetangga bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini tentu menjadi beban bagi masyarakat yang memiliki anggota keluarga terlebih jika masih ada yang mengenyam pendidikan.⁵

⁴ Khoirul Amin. 2020. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Melalui Industri Sabut Kelapa. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bandar Lampung

⁵ Fitria. 2020. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Adl Islamic Economic, Volume 1 Nomor 1 Mei 2020

Masyarakat beserta pemerintah daerah dan pemerintah desa Hendrosari telah disulap menjadi desa yang hijau akan tanaman serta lahan-lahan pertanian yang tertata secara rapi yang mana juga bisa dijadikan tempat wisata bagi anak-anak serta para siswa yang masih duduk di bangku sekolah sebagai Edu wisata tentang tanaman dan juga pemanfaatan lahan sebagai sumber bahan pangan dan cara bercocok tanam (<http://gresikab.go.id>). Agenda dari pemerintahan mencoba untuk bercampur dengan pemahaman-pemahaman mengenai posisi masyarakat lokal sendiri atau kedaulatan masyarakat lokal, khususnya dalam kasus ini adalah posisi masyarakat desa Hendrosari dalam wacana pembangunan. Dengan adanya hal tersebut masyarakat telah mencapai dimana titik lemahnya subjektivitas, sehingga memunculkan penguasa (pemerintah) yang hadir untuk mempengaruhi lemahnya subjektivitas mereka. Dimana subjektivitas untuk membangun sebuah wisata desa dan jadilah desa wisata di desa Hendrosari, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik.

Menurut Soemarno suksesnya pembangunan sebuah desa wisata dapat ditempuh melalui upaya-upaya seperti pembangunan SDM, kemitraan, kegiatan Pemerintahan di desa, promosi, festival atau pertandingan, membina organisasi masyarakat, dan kerja sama dengan universitas.⁶ Dan ini bisa dilihat bahwa wisata lontar sewu mempromosikan melalui media sosial dengan men *upload* spot-spot foto sebagai daya tarik untuk anak muda, dan juga tanaman-tanaman yang tertata rapi sebagai daya tarik orang tua dan juga pada guru sebagai tempat wisata bagi anak-anaknya.

Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 71 waktu itu anak-anak muda yang tergabung dalam wadah Karang Taruna Putera Harapan Desa Hendrosari mengadakan kegiatan lomba yang mengangkat eksistensi pohon siwalan, adapun

⁶ Soemarno (2010) Bahan kajian untuk MK. Ekonomi Sumber daya Alam. PDIP PPS FPUB

lomba yang diadakan adalah membuat menu olahan pohon siwalan dan juga panjat pohon siwalan. Lomba kreasi menu tersebut diikuti oleh perwakilan semua RT di desa Hendrosari. Dan hal tersebut tak lepas dari namanya pengenalan wisata desa secara tahap kecil.

Desa Hendrosari terpilih untuk mendapatkan dan menjalankan program Dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Pilot Inkubasi Program Inovasi Desa yang selanjutnya disebut Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi, kegiatan produksi dan jaringan pasar dari kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan melalui Kemitraan. Melalui program ini desa akan diberi fasilitas dan didorong untuk dapat menciptakan dan melakukan pengembangan produk unggulan desa melalui kemitraan di antara kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat desa, termasuk Koperasi, lembaga ekonomi desa (BUMDes), pelaku bisnis profesional dan pemerintah. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi guna mengurangi kemiskinan di Perdesaan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018).

Pengelolaan Desa edu wisata lontar sewu dilaksanakan oleh BUMDes dimana mereka memberdayakan masyarakat sekitar untuk dapat langsung mengembangkan serta mempertahankan eksistensi tempat wisata lontar sewu. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa setempat untuk koordinasi jalannya pembangunan dan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pengelola Edu Wisata Lontar Sewu adalah wajib warga desa Hendrosari dan sekarang ini yang ikut dan berpartisipasi dalam pengelolaan tempat wisata sekitar 40-60 orang. Setelahnya adanya wisata masyarakat merasa banyak diuntungkan salah satunya adalah dengan tidak menjual hasil lontar

keluar dari desa yang artinya sedikit menghemat tenaga karena para pembeli banyak yang berdatangan secara langsung ke desa Hendrosari hanya sekadar untuk mencicipi minuman khas desa lontar yaitu toak dan mengunjungi desa wisata lontar sewu.

Dengan adanya wisata lontar sewu para petani siwalan (bahan utama untuk membuat tuak minuman khas Desa Hendrosari) merasa pendapatnya naik hingga 2-3 kali lipat dari penghasilan sebelum adanya wisata lontar sewu dan adapun dampak positif lainnya terhadap masyarakat desa Hendrosari adalah meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang saat ini berjumlah 103 pelaku UMKM yang berjualan di sekitar tempat wisata lontar sewu yang mendobrak kereaktifan masyarakat untuk bisa memanfaatkan kondisi untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program serta kegiatan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Menurut sumodiningrat pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun kebudayaan masyarakat yang bersangkutan⁷.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan, kesejahteraan sangatlah diimpikan oleh semua orang termasuk kesejahteraan dalam tahapan hidup yang lebih layak yang mana setiap orang sangat menginginkan hal itu dan setiap negara. Kondisi masyarakat yang sejahtera menjadi suatu hal yang diinginkan di setiap negara termasuk negara Indonesia.⁸ Menurut Soetomo pemberdayaan merupakan tindakan untuk mengubah kondisi atau keadaan hidup

⁷ Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebiato (2015). Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Alfabeta

⁸ Soetomo, Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal. 34.

standar hidup yang sangat rendah masyarakat ke kondisi yang lebih baik dalam hal ekonomi, sosial budaya, dan politik.

Pemberdayaan masyarakat diperkuat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya dalam hal perekonomian serta kewirausahaan maka hal ini diperkuat melalui adanya BUMDes lontar sewu desa Hendrosari yang merupakan salah satu bentuk usaha untuk memberdayakan masyarakat lontar sewu desa Hendrosari dapat membantu masyarakat yang kesulitan dalam permodalan untuk berwirausaha, menjaring pasar untuk pasokan bahan agar mendapatkan harga yang rendah, memperkuat industri-industri kecil yang pelaku utamanya adalah masyarakat sekitar, sebagai jembatan untuk pemasaran produk dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lontar sewu desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Keberadaan BUMDes sangatlah dibutuhkan karena sebagai alat menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian harapan dengan dibentuknya BUMDes adalah terciptanya usaha baru yang berasal dari potensi yang ada di dalam desa serta mengoptimalkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, kemudian akan terjadi yang namanya peningkatan perekonomian masyarakat secara perlahan karena dorongan yang diberikan serta *support* dari BUMDes yang telah memberikan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan dalam ruang lingkup desa.

Badan Usaha Milik Desa yaitu usaha yang telah dirancang oleh pemerintah untuk mengelola potensi yang ada di pedesaan yang dibantu dan juga dimonetering oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan pengembangan BUMDes salah satu penguat lembaga ekonomi yang ada di desa yang berguna mencapai kesejahteraan masyarakat desa dan sebagai alat pendayagunaan ekonomi lokal yang

memanfaatkan dan mengelola potensi yang sudah ada⁹. Keberadaannya pada saat ini maupun untuk ke depan dapat menjadi roda penggerak pembangunan di desa dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. BUMDes yang dapat dimanfaatkan untuk menjadikan salah satu unit usaha yang dapat memberikan keuntungan maupun dapat memberikan dorongan masyarakat untuk lebih produktif dan kreatif.

Tujuan diadakannya BUMDes yaitu untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki desa, dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan asli desa. Dengan terciptanya produk-produk lokal yang unggulan dan mampu bersaing secara nasional merupakan salah satu tujuan dari BUMDes. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan potensi lokal menjadi pendukung dari tujuan BUMDes. Melalui BUMDes inilah Pemberdayaan masyarakat bisa terarah dan teratur. Untuk itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud akan melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Pemberdayaan Desa Wisata Edukasi Berbasis BUMDes Untuk Meningkatkan Ekonomi Kewirausahaan Di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1) Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan dan penjelasan pada latar belakang terdapat sebagian permasalahan yang muncul terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam

⁹ Cidir Ali, Badan Hukum, (Bandung, PT: Citra, 2005), hal. 107-109

meningkatkan perekonomian desa lontar sewu dan ekonomi kewirausahaan yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya antusiasme masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
- b. Terbatasnya ide kreatif masyarakat sehingga banyaknya pedagang yang berjualan produk yang sama karena minim kereaktifan.
- c. Kurangnya pengertian Masyarakat Desa Hendrosari yang lebih condong untuk usaha pasrah terhadap keadaan karena memang kurangnya edukasi terhadap masyarakat karena SDM yang kurang mumpuni dalam pemahaman pemberdayaan masyarakat.

2) Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dari penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan oleh peneliti pembahasan dalam penelitian kali ini sangatlah banyak permasalahan yang belum terselesaikan oleh karena itu dibutuhkan batasan masalah agar peneliti lebih fokus dan terarah dalam mengupas permasalahan terhadap Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDES untuk meningkatkan Ekonomi Kewirausahaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),
2. Bagaimana keadaan Ekonomi masyarakat lontar sewu desa Hendrosari pra adanya desa wisata dan pasca adanya desa wisata.

D. Kajian Pustaka

Pada bagian Kajian Pustaka, ada beberapa penelitian terdahulu yang menganalisa sekaligus meneliti kajian tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui BUMDES untuk meningkatkan perekonomian, Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan mendukung analisis yang lebih mendalam, maka penulis melakukan pengamatan terhadap kajian pustaka dan karya-karya penelitian terdahulu diantaranya yaitu:



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pokok Pembahasan	Perbedaan
1.	<p>Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah)</p> <p>Nano Prawoto Email: prawotonano@yahoo.com</p>	<p>Penelitian mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kemandirian untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat Dieng di provinsi Jawa Tengah merupakan penelitian deskriptif investigatif untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan pembangunan ekonomi masyarakat khususnya menyangkut ketahanan pangan. Output dari kegiatan penelitian ini yaitu tersusunnya program dan kegiatan strategik (strategic plan) secara integral dan komprehensif dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Dieng. Metode penelitian ini menerapkan beberapa metode analisis (multi-methods analysis) yaitu dengan mengaplikasikan beberapa metode yaitu metode Location Quotion (LQ), analisis SWOT, analisis Trend, dan analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada sub-sektor pertanian. Penelitian ini memiliki nilai dan tujuan strategis disamping memberikan informasi penting untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Dieng khususnya dan masyarakat tertinggal di Indonesia pada umumnya.</p>	<p>Menciptakan pengemangan pemberdayaan masyarakat yang menjalankan usaha mandiri untuk kepentingan ekonomi dan ketahanan pangan</p>	<p>Perbedaannya terdapat dalam kajian yang diambil metode kasus pembahasan antara kajian penelitian ketahanan pangan sedangkan pada penelitian sekarang lebih mengarah pada pemberdayaan ekonomi.</p>
2.	<p>Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Soft Skill Pembuatan Krupuk Samiler dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kabupaten Bondowoso.</p> <p>NurulQomariah Email: nurulqomariah@unmu-hjember.ac.id</p>	<p>Beberapa hal yang bisa disimpulkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: Pada umumnya permasalahan yang terjadi di masyarakat pedesaan adalah banyaknya waktu yang terbuang karena mereka bekerja di sawah. Pendapatan yang mereka terima hanya cukup untuk keperluan sehari-hari. Sehingga tidak jarang masyarakat desa masih kurang bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dapat memberikan keterampilan pembuatan krupuk samiler sehingga diharapkan dengan memiliki keterampilan, masyarakat bisa memanfaatkan waktu luang mereka untuk menghasilkan produk</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat desa dengan sistem menciptakan produktivitas yang dapat menghasilkan dan meningkatkan penghasilan.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada studi kasus yang diambil penelitian terdahulu tentang pembuatan krupuk dengan sekarang tentang bumdes.</p>

		berupa krupuk samiler yang nantinya dapat menambah pendapatan masyarakat desa.		
3.	<p>Desa Wisata Hidroponik sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Negara.</p> <p>Hendra Saputra, Rudianto, Dwikie Setiawan, Rudy Agung Nugroho.</p> <p>Email: rudyangung.nugroho@mipa.unmul.ac.id</p>	<p>Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini telah berlangsung dengan baik, dimulai dengan kegiatan persiapan hingga terlaksananya program inti. Capaian kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok kecil dalam setiap Rukun Tetangga (RT) untuk bercocok tanam secara hidroponika; adanya kunjungan pendidikan ke Desa Wisata Hidroponika dari siswa-siswi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP,) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berlokasi di Kecamatan Anggana. Hasil yang dicapai lainnya adalah, adanya pusat desa wisata hidroponika dan penjualan alat serta bahan hidroponika. Masyarakat sekitar sering berkunjung ke pusat hidroponika pada sore hari dan membeli peralatan serta sayuran hidroponika serta belajar teknik menanam hidroponika.</p>	Mewujudkan Wisata sebagai usaha untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa.	Perbedaannya terletak dimana upaya masyarakat umum yang menjadi dasar untuk meneliti sedangkan sekarang lebih mengarah kepada kewirausahaan.
4.	<p>Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Desa Wisata Pantai Trisik, Kulonprogo.</p> <p>Arina Pramusita, Eska Nia Sarinastiti</p> <p>Email: arina.pramusita@ugm.ac.id, eskanias@ugm.ac.id</p>	Menjadikan desa wisata yang berorientasi kepada wisata yang mengarah kepada aspek sosial ekonomi.	Desa Wisata merupakan salah satu hal yang banyak diminati oleh sebagian orang dan menjadi peluang usaha bagi masyarakat lokal.	Perbedaannya terletak pada aspek pengelolaan desa dengan sekarang yaitu meningkatkan ekonomi.
5.	<p>Dampak Ekonomi, Sosial-Budaya dan Lingkungan Pengembangan Wisata di Jatiluwih-Tabanan</p> <p>I Nengah Subadra, Nyoman Mastiani Nadra</p>	Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pembangunan pariwisata yang memperhatikan usaha-usaha melestarikan seluruh kehidupan sosial-budaya masyarakat lokal dan lingkungan hidup yang ada di daerah tujuan wisata serta memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal secara berkelanjutan sehingga ketiga aspek (sosial-budaya, lingkungan hidup dan ekonomi) dapat diwariskan ke inter generasi dan antar generasi. Pembangunan pariwisata	salah satu contoh yang dapat diambil ketika membuka wisata di desa maka berdampak dan berubah secara finansial dari sudut pandang ekonomi maupun sosial-budaya secara berkala.	Perbedaannya terletak pada dampak ekonomi dengan sekarang acuan dasar desa untuk kewirausahaan.

		berkelanjutan di Desa Wisata Jatiluwih belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek pola pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dua aspek keberlanjutan yaitu aspek sosial-budaya dan lingkungan telah terpenuhi. Kehidupan sosial budaya khususnya pertanian, gotong royong, dan kegiatan-kegiatan keagamaan masih tetap terjaga kelestariannya walaupun tempat ini banyak dikunjungi wisatawan. Sumber daya alam (sawah teras siring) yang dijadikan sebagai objek dan daya tarik wisata utama masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat lokal yang secara langsung melestarikan budaya pertaniannya. Sedangkan aspek pemberian manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal belum terpenuhi karena kurangnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, pelestarian dan penilaian terhadap pembangunan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih.		
6.	<p>Implikasi Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi di Desa PAO)</p> <p>Indrayani Nur, I Nyoman Marantha, Syafri, Faridah</p> <p>Email: Indrayani@universitasbosowa.ac.id iman7055@yahoo.com ianoilo_syafri@yahoo.co.id Faridah@universitasbosowa.ac.id</p>	Desa Pao merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yang memiliki potensi alam yang menakjubkan dan sebagai desa penghasil tanaman hortikultura. Pelibatan masyarakat desa setempat dalam pengembangan desa wisata merupakan salah satu proses penguatan potensi desa. Proses penguatan potensi desa merupakan sebuah keniscayaan yang mutlak dilakukan dalam pengembangan sebuah kawasan menjadi desa wisata, seperti yang dilakukan di desa Pao. Penguatan potensi yang dilakukan di desa Pao dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu tahapan penyadaran, pelatihan dan pendampingan. Pada tahapan penyadaran ini perubahan paradigma berfikir masyarakat dilakukan dengan memberikan penyadaran akan potensi desa yang dimiliki dan bagaimana potensi desa tersebut dikelola agar visi desa Pao sebagai desa wisata dapat tercapai. Pada tahapan pelatihan, masyarakat diberi pelatihan tentang cara mengolah hasil pertanian mereka menjadi produk yang memiliki nilai	objek dari masyarakat lokal adalah desa wisata yang dapat dijadikan sebagai manifestasi dari peningkatan ekonomi secara komprehensif.	Perbedaannya terletak pada pengembangan desa dengan sekarang yaitu pemberdayaan ekonomi.

		<p>tambah ekonomi yang tinggi. Salah satu pelatihan yang telah dilakukan adalah pembuatan selai tomat. Pada tahapan pendampingan, pemerintah desa dan masyarakat terus didampingi dalam proses penguatan potensi desa agar proses tersebut bisa terus berjalan dan berkelanjutan. Kedua, proses penguatan potensi desa yang dilakukan dalam tiga tahapan, pemerintah desa Pao bermitra dengan perguruan tinggi yang ada di kota Makassar, Hal ini dimaksudkan agar proses penguatan potensi dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam proses penguatan potensi desa menuju desa wisata berbasis ekowisata adalah sumber daya manusia yang masih rendah dan belum profesional dalam mengelola desa wisata. Selain kendala sumber daya manusia, kendala lain yang dihadapi adalah sarana dan prasarana wisata yang belum memadai seperti akses yang sempit dan belum beraspal.</p>		
7.	<p>Membangun Pariwisata Bersama Rakyat: Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau</p> <p>Destha Titi Raharjana</p> <p>Email: raharjanadestha@yahoo.co.id</p>	<p>Pembangunan yang dipahami sebagai proses perubahan di dalam kehidupan semestinya melibatkan masyarakat sebagai unsur yang tidak terpisahkan. Masyarakat sebaiknya tidak dipandang sebagai objek pembangunan semata. Adanya paradigma bottom up planning diharapkan masyarakat dapat berperan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dalam konteks pembangunan desa wisata, dalam proses perencanaan harus sejak awal melibatkan masyarakat lokal. Dataran Tinggi Dieng sebagai objek wisata memiliki keragaman atraksi. Desa wisata dirancang oleh masyarakat setempat untuk melengkapi atraksi wisata di Dieng. Kajian ini menfokuskan pada proses partisipasi masyarakat Dieng Kulon dalam membangun desa wisata di lingkungan tempat tinggal mereka. Berbagai tahapan perencanaan dikerjakan secara kolektif dan kemudian dipraktekkan bersama-sama. Dengan menerapkan metode action riset, studi ini menemukan beberapa temuan berikut:</p>	<p>Pembangunan yang dipahami sebagai proses perubahan di dalam kehidupan semestinya melibatkan masyarakat sebagai unsur yang tidak terpisahkan.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada partisipasi lokal membangun desa dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.</p>

		(a) identifikasi masalah-masalah dalam pengembangan desa wisata, (b) pemetaan potensi desa wisata, dan (c) identifikasi potensi jejaring antar lembaga yang dapat mendukung keberlanjutan desa wisata di Dieng Kulon.		
8	Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata berbasis Masyarakat Dian Herdiana Email: kyberdian@gmail.com	Pengembangan desa wisata merupakan bentuk kebijakan pembangunan perdesaan yang mencoba melakukan diversifikasi desa yang selama ini banyak berbasis kepada pertanian. Desa wisata dikembangkan untuk menjadi desa yang berbasis kepada industri wisata, baik usaha jasa maupun usaha niaga dalam bentuk produk wisata. Desa wisata dalam pengembangannya merupakan proses penggalian potensi yang ada di desa baik itu berasal dari unsur alam, sosial, budaya, masyarakat atau lainnya, sehingga sifat alamiah dan kelestarian karakteristik desa tetap terjaga dan terpelihara.	pengembangan desa wisata adalah bentuk dari kebijakan pembangunan perdesaan yang mencoba melakukan diversifikasi desa yang selama ini banyak berbasis kepada pertanian dan mengarahkan kepada industri wisata.	Perbedaannya terletak pada peran masyarakat yang menjadi studi kasus dengan pengelolaan bumdes yang baik.
9	Potensi Pengembangan Desa Kliwonan sebagai Desa Wisata Batik di Kabupaten Sragen Ninik Wahyuning Tyas & Maya Damayanti Email: tyas.wahyuny@gmail.com	Desa Kliwonan saat ini masih dalam masa peralihan dari desa yang memproduksi batik menuju desa wisata batik. Desa batik yang dimaksudkan di sini adalah peran dari Desa Kliwonan sebagai desa penghasil/produsen batik yang telah memberikan layanan berupa wisata edukasi dan wisata belanja melalui showroom batik.	desa yang memproduksi batik menjadi daerah wisata batik sebagai analogi.	Perbedaannya terletak pada potensi pengembangan dengan aspek pemberdayaan masyarakat.
10	Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia Hendri Hermawan Adinugraha Mila Sartika Ana Kadarningsih	Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang positif dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah ataupun negara. Wisata halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek muamalat sebagai pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi yang	desa wisata sebagai implikasi dari nuansa religiusitas yang tercakup dalam segala aspek sosial budaya dan sosial ekonomi.	Perbedaannya terletak antara desa wisata halal dengan aspek meningkatkan ekonomi melalui bumdes.

	<p>Email: hendri.hermawan@dsn.dinus.ac.id mila.sartika@dsn.dinus.ac.id ana.kadarningsih@dsn.dinus.ac.id</p>	<p>berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik wisata dalam perspektif syariah senantiasa dilandaskan terwujudnya kebaikan (maslahat) bagi masyarakat baik maslahat di dunia maupun di akhirat (fi ad-daraini) secara agregat serta simultan. Oleh karena itu, dengan adanya Desa Wisata Halal ini seyogianya akan menjadi salah satu bukti fleksibilitas syariah Islam dalam tataran praktis gaya hidup masa kini (current lifestyle) melalui integrasi nilai halal dan thoyyib dalam sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang berkah.</p>		
11	<p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur) TYAS ARMA RINDI</p>	<p>Pemberdayaan merupakan aspek penting dalam pengembangan desa wisata. Hal ini dikarenakan pengembangan desa wisata banyak memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting untuk menunjang keberhasilan pengembangan desa wisata sehingga masyarakat yang tidak berdaya perlu diperdayakan untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan sumber data baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini meneliti tentang potensi yang ada di desa wisata dengan melihat potensi yang ada seperti kerajinan bambu, grass track, dan embung tirta asa. Sumber data yang diperoleh dari kepala desa, ketua PODARWIS Wonokarto, ketua grass track, paguyuban guyub rukun dan masyarakat setempat untuk dijadikan narasumber. Dari hasil penelitian banyak ditemukan kreasi unik dan ide menarik dengan adanya desa wisata menambah peluang penghasilan bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran serta mengurangi kejahatan di wilayah tersebut dengan melatih anak muda membuat kreasi terbaru dan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Dengan adanya desa wisata dapat memberdayakan masyarakat desa</p>	<p>hal ini merupakan kreasi unik dan ide yang menarik dengan adanya wisata dapat menambah peluang penghasilan bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran sekaligus kejahatan di wilayah tersebut.</p>	<p>Perbedaannya terletak antara pengembangan desa wisata dengan meningkatkan kewirausahaan yang komprehensif.</p>

		Wonokarto.		
12	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi Deskriptif Kualitatif tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Murniati	Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimanakah proses penyebaran informasi tentang Keputusan Bupati Sukoharjo tentang penancangan Desa Wirun sebagai desa wisata dan apa harapan masyarakat Desa Wirun terhadap hal tersebut. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata di Desa Wirun.	Desa Wirun sebagai Desa Wisata dan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan harapan di masa yang akan mendatang.	Perbedaannya terletak antara partisipasi dengan upaya produksi kewirausahaan bumdes.
13	Dampak Penetapan Desa-Desa di Kabupaten Sleman sebagai Desa Wisata Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat. Urbanus Yulianto Kurniawan	Sesudah penetapan sebagai desa wisata jumlah pendapatan keluarga mengalami perbedaan yang signifikan yaitu menjadi meningkat dibandingkan sebelum penetapan sebagai desa wisata. Sesudah penetapan sebagai desa wisata curahan kerja dalam bidang pertanian tidak mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan sebelum penetapan sebagai desa wisata. Sesudah penetapan sebagai desa wisata curahan kerja dalam bidang non-pertanian tidak mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan sebelum penetapan sebagai desa wisata.”	kesuksesan yang diraih ketika masyarakat dengan Desa yang dijadikan objek pemasaran sekaligus penghasilan dapat bekerja dengan maksimal.	Perbedaannya terletak antara dampak penetapan desa wisata dengan bentuk analogi desa yang menciptakan peluang usaha bumdes.

Sumber: Data Diolah Penulis

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pada pemberdayaan masyarakat melalui BUMDES lontar sewu Hendrosari serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor peningkatan ekonomi dan ekonomi kewirausahaan di desa Hendrosari pasca adanya desa wisata dan keadaan ekonomi pra adanya desa wisata.

F. Kegunaan Hasil penelitian

1. Secara Teoretis karya penelitian ini mampu memberikan sedikit penjelasan terkait pemberdayaan Ekonomi melalui BUMDES serta factor-faktor yang

mempengaruhi tujuan dari dibentuknya BUMDES yakni Peningkatan Perekonomian masyarakat.

2. Secara Praktis untuk memberikan masukan kepada instansi-instansi pemerintah desa maupun tokoh masyarakat untuk membantu desa-desa tertentu agar lebih mandiri dengan potensi yang ada di setiap desa atau daerah.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini mempunyai Judul “UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BUMDES UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KEWIRAUSAHAAN (Studi Kasus: BUMDes Lontar Sewu)” Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan dan bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian, untuk menuju kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada melalui kegiatan maupun program dengan adanya pendampingan maupun pelatihan khusus yang digandakan secara rutin. Pemberdayaan memperkuat kelompok masyarakat yang lemah dengan memberikan motivasi, pengarahan, peminjaman modal, serta menggali potensi yang dimiliki sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan taraf hidup masyarakat¹⁰.
2. Kewirausahaan dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu *adventurism* (Petualangan), *risk-taking* (pengambilan risiko) dan *thrill seeking* (pengincaran ketegangan). Bila tiga bentuk itu disimpulkan, maka seorang wirausaha merupakan orang yang suka berpetualang mencari hal-hal baru, berani mengambil risiko dan hal-hal baru

¹⁰ Deny Nofriansyah, (2018) “*analisis kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan*”. (Yogyakarta: Dee publish,.) hal 29.

tersebut bersifat menantang.¹¹ Menurut Bukhari Alma wirausaha atau *entrepreneur* adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut.¹²

3. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian yang ada di desa dan membangun kerekatan hubungan sosial masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa¹³.

Badan usaha milik desa (BUMDES) menurut pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu, badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki oleh desa yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelola aset dan usaha lainnya yang tujuan besarnya untuk menyejahterakan masyarakat desa. Didirikannya BUMDes Lontar Sewu di desa Hedrosari merupakan salah satu bentuk untuk mengelola potensi desa yang ada di Hendrosari sekaligus sebagai wadah masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola potensi desa dan nantinya pendapatan dari hasil usaha milik desa bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri, sehingga mampu menjadi desa yang sejahtera dan memiliki taraf hidup yang lebih baik. melalui pandangan ini jika pendapatan asli di peroleh dari BUMDES maka akan mendorong pada setiap pemerintah desa memberikan *goodwill* dalam merespons pendirian BUMDES karena menjadi salah satu lembaga ekonomi yang ada di desa Hendrosari maka harus ada perbedaan lembaga ekonomi pada umumnya..

H. Metode Penelitian

Metode ilmiah adalah suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah langkah yang berurutan seperti pengumpulan data, analisis data dan

¹¹ Frinces, Heflin.2004. "Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis". Yogyakarta: Darussalam

¹²Bukhari Alma. Kewirausahaan (C et, VII; Bandung; Al Fabate, 2004), h.21

¹³ Maryunani, "Pembangunan BUMDes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa", (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008) hal. 35

pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, mengontrol fenomena.

Tujuan ini berhubungan dengan pemerolehan pengetahuan dan pengembangan pengujian teori-teori di dalam penelitian atau sebuah kajian pasti melibatkan penalaran induktif serta deduktif untuk meyakinkan bahwa kajian yang dipaparkan terbukti keasliannya¹⁴. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ketentuan atau aturan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian¹⁵ Untuk mendapatkan kesempurnaan penelitian, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berlokasi di desa Hendrosari, kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dimana titik pengambilan data ini terkait tentang pemberdayaan masyarakat yang terjadi di desa Hendrosari. Kebanyakan warganya memilih untuk bekerja di luar dari Hendrosari sebagai buruh pabrik sebelum adanya wisata desa lontar sewu yang dibangun oleh BUMDes Desa Hendrosari dijuluki dengan nama desa lontar sewu karena banyaknya tanaman lontar yang tumbuh di desa Hendrosari memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh desa-desa lainnya dengan banyaknya tanaman lontar yang tumbuh yang artinya dapat dimanfaatkan dalam peningkatan perekonomian dengan pengolahan tanaman lontar yang menarik jika dapat mengelola sumber daya dengan baik. akan tetapi masyarakat lebih memilih untuk bekerja di luar karena menganggap hanya mengandalkan dari penjualan hasil olahan lontar sangatlah kurang dalam memenuhi kebutuhan

¹⁴ Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif, Prof. Dr. Emzir, M.Pd. Cetak ke 9. Hal. 320

¹⁵ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hal.4.

hidup apalagi dalam memasarkan olahan lontar harus menempuh jalan yang begitu panjang agar bisa memasarkan olahan lontar diluar dari desa Hendrosari sangatlah tidak efisien.

B. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian dilihat dari jenis lokasi penelitian dilaksanakan, penelitian ini digolongkan pada penelitian (*field research*) penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden untuk memperoleh data melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa Hendrosari, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik.
2. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis suatu metode penelitian yang mengumpulkan data yang disusun, dijelaskan. Dianalisis, dan kemudian disimpulkan¹⁶.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian dan sumber yang terkait dalam penelitian. Dalam metode pengumpulan data terdapat metode penelitian yakni:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung tanpa adanya perantara, akan tetapi observasi di sini diartikan lebih sempit yaitu pengamatan dengan menggunakan penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah non partisipasi, hanya sebagai pengamat dan tidak mengambil kehidupan yang di observasi hanya mengamati aktivitas masyarakat dan melihat *step by step* kegiatan pemberdayaan masyarakat serta

¹⁶ Zainuddin Ali, Metode penelitian Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke-3, 2011) hal. 106

melihat perubahan yang dialami anggota Badan Usaha Milik (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan ekonomi kewirausahaan masyarakat desa Hendrosari.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden dicatat atau di rekam dengan alat perekam (tape recorder)¹⁷, Dalam wawancara ini dilakukan dengan anggota BUMDES, pelaku usaha di desa wisata Hendrosari, Masyarakat setempat. metode ini ditujukan sebagai sampel data penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan secara langsung dan adapun data tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, implementasi pelaksanaan BUMDES Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan mengambil sampel berupa foto, catatan dari hasil penelitian, dokumentasi juga berisi tentang foto kegiatan pemberdayaan masyarakat disorganizer oleh BUMDES desa Hendrosari, dan hasil wawancara baik secara lisan maupun tertulis untuk menghasilkan data yang valid dan bukan hasil dari pemikiran.

D. Sumber Data dan Data

1. Sumber data yang diterapkan peneliti dalam metode penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

¹⁷ Irawan Soeharto, Metode penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetakan ke-8, 2011) hal.67

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung kepada pihak yang bersedia dijadikan subjek untuk memberikan informasi terkait pembahasan penelitian. Subjek yang dijadikan penelitian antara lain: Anggota BUMDES, masyarakat setempat, serta pelaku usaha desa wisata lontar sewu
 - b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung, baik melalui perancangan yang sudah disusun oleh BUMDES, ataupun catatan dari hasil pemberdayaan masyarakat yang sudah dikemas rapi sebagai panduan.
2. Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian yang didapatkan dari sumber data yang memberikan informasi yang diperoleh dari pengamatan maupun literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.
- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara lapangan terhadap responden yang dipilih untuk dijadikan subjek penelitian. Dimana data primer merupakan hasil dari wawancara pihak yang bersedia memberikan data dan informasi sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti. Pihak yang dijadikan subjek penelitian antara lain adalah Anggota BUMDES, masyarakat setempat, serta pelaku Usaha di desa wisata lontar sewu.
 - b. Data Sekunder adalah data yang didapat dari hasil telaah bacaan, atau kajian pustaka, literature atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Nihla Himania, 2019). “Peran Desa Wisata Kampung Susu Dynasty Dalam Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidem Kecamatan Gundang Tulung agung” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. Hal. 43.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹⁸. Analisis data kualitatif yang berarti menarik sebuah makna, dari serangkaian data mentah menjadi sebuah kata interpretasi peneliti dimana interpretasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan¹⁹. Menurut Miles dan Huberman, analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam data tersebut yaitu, reduksi data, penyajian data dan display data serta pengambilan kesimpulan²⁰. Analisis data merupakan salah satu tahap pertengahan dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil dari penelitian yang dihasilkan harus diolah dengan analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya²¹.

a. Reduksi data dilakukan pemilihan dan transformasi dari data kasar yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung bersama masyarakat, pelaku usaha desa wisata, dan anggota BUMDES desa Hendrosari, kecamatan Menganti kabupaten Gresik. kemudian data-data tersebut akan dikategorikan kedalam bentuk informan, yang meliputi:

- 1) Anggota Badan Usaha Milik Desar.
- 2) Masyarakat setempat.

¹⁸ HusainiUsmani, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi aksara, 2009)h. 24.

¹⁹ Haris Herdiansyah, Wawancara, observasi, dan fokus groups sebagai instrumen penggalian data kualitatif, (Jakarta: Raja Graf indo persada, 2013), h.19

²⁰ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 246

²¹ Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika), hal: 158

3) Pelaku usaha Desa wisata lontar sewu.

b. Display data

Adalah penyajian data dalam bentuk metrik, grafik, chart. Penyajian data dilakukan dengan cara menyampaikan informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dalam bentuk naratif sehingga mudah untuk dipahami. Data-data tersebut yaitu:

- Data angka pendapatan desa Hendrosari pra adanya wisata desa lontar sewu
- Data angka pendapatan desa Hendrosari pasca adanya desa wisata lontar sewu
- Data jumlah wirausahawan pra dan pasca adanya pemberdayaan desa wisata lontar sewu

c. Penarikan kesimpulan diperoleh dari berbagai sumber kemudian peneliti mengambil simpulan dan bersifat sementara sambil mencari data pendukung. Setelah rangkaian analisis selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan dan memberikan penafsiran data dan menarik kesimpulan secara sistematis yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat kedalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Pada tahap ini sistematika pembahasan dibuat penulis untuk mempermudah dalam mengurutkan rangkaian dalam menyusun penelitian. Penelitian ini membahas tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDES Untuk Meningkatkan perekonomian Desa Dan Ekonomi Kewirausahaan (studi kasus: BUMDES Lontar Sewu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)”.

Dalam Penulisan penyusunan penelitian, peneliti menggunakan sistematika penulisan:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab Pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah yang akan memaparkan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti serta cuplikan pembahasan dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bab yang terdiri dari landasan teori tentang penelitian terkait yaitu pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi desa dan ekonomi kewirausahaan desa lontar sewu.

BAB III Data Penelitian

Bab data penelitian menguraikan deskripsi data yang berkaitan dengan variabel yang diteliti secara objektif dan tidak ada campuran asumsi dari peneliti dan data yang digunakan harus lengkap serta memenuhi untuk diteliti.”

BAB IV

Analisis Data analisis data merupakan penjelasan dari analisis data berdasarkan data penelitian yang di deskripsi untuk memenuhi jawaban terhadap permasalahan penelitian yang menggunakan metode kualitatif.

BAB V

Penutup bab terakhir terdiri dari 2 bagian yakni: kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang penjelasan ringkas hasil dari penelitian. Dalam penelitian dimana dalam bab penutup ini penulis masih mengalami keterbatasan dalam penelitian sehingga sangat memerlukan saran dari berbagai pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan yaitu suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau (*strengthening*) penguatan terhadap masyarakat. Dengan kata lain pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian maupun kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada melalui kegiatan maupun program dengan adanya pendampingan. Pemberdayaan memperkuat kelompok masyarakat yang lemah dengan memberikan motivasi, pengarahan, serta menggali potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan.²²

Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (miskin, terpinggirkan) dalam mengelola suatu kelembagaan masyarakat demi memperbaiki kehidupan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pemberdayaan yaitu sebuah perbaikan kualitas hidup atau kesejahteraan individu dan masyarakat baik perbaikan perekonomian dan kesejahteraan dalam segi kesehatan dan pendidikan.²³

Menurut Rusli pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara atau pendapat mereka dengan memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk

²² Deny Nofriansyah, Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 29

²³ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung : Alfabet, 2015), hal. 28

menggunakan keahlian di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja seluruh organisasi.²⁴

Menurut Soetomo pemberdayaan merupakan tindakan untuk mengubah suatu keadaan masyarakat dimana standar hidupnya sangat rendah ke kondisi yang lebih baik dalam hal ini ekonomi, sosial budaya dan politik. Pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan, dimana kesejahteraan merupakan idaman setiap orang dan setiap negara. Kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadi sesuatu yang diidealkan.²⁵

Menurut Zubaedi pemberdayaan yaitu upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, hal ini berarti masyarakat diperdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.²⁶ Menurut Direktorat Jenderal pemberdayaan merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.²⁷

Dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa disebutkan mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesetaraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.²⁸

²⁴ZailiRusli, *“Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Progam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam”*, (Pekanbaru : Universitas Riau, 2012), hal. 7

²⁵Soetomo, *“Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal”* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hal. 34

²⁶Zubaedi, *“Wacana Pengembangan Alternatif”*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal. 24

²⁷Renstra (Rencana Strategis) tahun 2019, *“Direktorat Jenderal Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”*

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya dalam kegiatan perekonomian agar terpenuhinya kebutuhan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan memperkuat program yang telah ada yaitu BUMDes, merupakan cara untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di desa. Dengan adanya BUMDes dapat membantu masyarakat yang kesulitan dalam permodalan untuk berwirausaha, memperkuat perindustrian kecil yang dilakukan oleh masyarakat, sebagai jembatan dalam melakukan pemasaran produk, dan dapat membuka lapangan pekerjaan.²⁹

Dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan adalah memberikan suatu daya atau kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Tujuan pemberdayaan

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak perdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Dalam rangka melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakpercayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.

²⁹ PERMEN Desa No. 22 Tahun 2016, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

- b. Kelompok lemah khusus, secara manual, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia serta para penyandang cacat ialah orang-orang yang mengalami ketidak perdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari keumuman kerap kali dipandang sebagai penyimpangan. Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidak perdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekuranganadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.³⁰

Menurut Sondang P. Siagaan yang dikutip oleh Khoriddin dalam buku Pembangunan Masyarakat, tujuan dari pemberdayaan masyarakat meliputi diantaranya yaitu:³¹

- a. Keadilan sosial
- b. Kemakmuran merata
- c. Perlakuan yang sama di mata hukum
- d. Kesejahteraan material, mental dan spiritual
- e. Kebahagiaan untuk sesama serta ketentraman dan keamanan

3. Pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu usaha untuk membangun daya atau kekuatan masyarakat dalam melakukan perekonomian

³⁰ Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), Hlm 60-61

³¹ Khoriddin, Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Liberty, 1992), Hlm. 29

khususnya dengan memotivasi, mendorong, dan menggali segala potensi yang dimiliki, sehingga dapat mengubah suatu kondisi dimana yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dengan adanya tindakan secara nyata untuk meningkatkan harta maupun martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.³²

Pemberdayaan ekonomi dapat terwujud jika berfokus dan tepat sasaran pada pengentasan kemiskinan yang ada, menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta demokrasi dalam berpolitik. Penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan cara penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan untuk memperoleh upah atau gaji, penguatan memperoleh informasi, dan yang paling penting dalam penguatan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan individu maupun masyarakat agar mampu berdiri sendiri.³³

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu usaha untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi ekonomi masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk melepaskan diri dari kemiskinan.

4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam pemberdayaan ada kondisi dimana masyarakat secara umum memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya

³²Darwanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12, No. 13, tahun 2016, hal. 68

³³ Dr. Andreas, dkk, Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial, (Medan: Raja Garuda, 2016), hal. 23

masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak kebudayaan masyarakat untuk keluar dari hambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya ini nantinya dapat mengaktualisasikan potensi diri dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak dari pembangunan.

Menurut Agnes Sunartiningsih (2004: 140), menyebutkan proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diharapkan mampu:

1. Menganalisis situasi yang ada dilingkungannya.
2. Meningkatkan kualitas hidup anggota.
3. Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki.
4. Meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat.
5. Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

Gambaran tentang tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersebut menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan memperkuat kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya. Berdasarkan beberapa kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat berdaya dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang digunakan dalam kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

5. Faktor pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat

Menurut Hutomo, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, yaitu sebagai berikut :³⁴

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah komponen terpenting dalam setiap program pemberdayaan ekonomi, oleh sebab itu perlu adanya pengembangan terhadap sumber daya manusia. Dalam pengembangannya harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumber daya manusia adalah unsur paling fundamental atau dasar dalam penguatan ekonomi.”

b. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan salah satu sumber daya pembangunan yang penting dalam proses pemberdayaan ekonomi. Karena sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.”

c. Permodalan

Salah satu aspek yang sering dihadapi oleh masyarakat yaitu mengenai permodalan. Namun, ada hal yang perlu dicermati dalam aspek permodalan yaitu, cara pemberian modal agar tidak menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat sendiri, serta dapat mendorong usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah supaya berkembang ke arah yang maju. Dengan adanya menjamin kredit di lembaga keuangan dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman di lembaga keuangan, merupakan cara yang cukup baik dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

³⁴Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi, (Jakarta : Bappenas, 2000), hal. 2-3

d. Prasarana Produksi dan Pemasaran

Prasarana produksi dan pemasaran sangat diperlukan sebagai pendorong produktivitas dan tumbuhnya suatu usaha. Jika hasil produksi tidak dipasarkan maka usaha akan menjadi sia-sia. Untuk itu, komponen penting yang lainnya dalam pemberdayaan ekonomi yaitu tersedianya prasarana produksi dan pemasaran. Dengan tersedianya prasarana pemasaran seperti alat transportasi dari lokasi produksi ke pasar akan mengurangi rantai pemasaran dan akhirnya dapat meningkatkan penerimaan masyarakat dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, maupun pengusaha menengah.”

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Secara etimologi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang berarti hukum atau yuridis, teknis, dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau laba, sedangkan kata milik diartikan sebagai kepemilikan sementara, dan desa merupakan satu kesatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Maka dari itu, BUMDes adalah sebuah usaha yang dilakukan sistem pemerintahan yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.

BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang pengelolaannya di kelola oleh masyarakat serta pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian yang ada di desa dan membangun kerekatan dalam hubungan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.³⁵ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu

³⁵Maryunani, Pembangunan BUMDes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa, (Bandung :CV.Pustaka Setia, 2008) hal. 35

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melakukan suatu usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil atau keuntungan untuk menyejahterakan masyarakat desa. BUMDes sendiri bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Di dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 mengatur mengenai BUMDes, bawahannya Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Selain itu juga diatur dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa yang di dalamnya mengatur tentang BUMDes.³⁶

Didirikannya BUMDes dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Melalui pandangan ini, jika pendapatan asli desa diperoleh dari BUMDes, maka akan mendorong pada setiap Pemerintah Desa memberikan *goodwill* dalam merespons pendirian BUMDes. BUMDes menjadi salah satu lembaga ekonomi yang ada di desa, maka harus memiliki perbedaan lembaga ekonomi pada umumnya. Dimaksudkan keberadaan BUMDes maupun kinerja BUMDes sendiri mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

³⁶ Amelia Kusuma, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai upaya Dalam Meningkatkan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa", Jurnal Hukum, Vol. 5, No.1, Tahun 2014, hal. 2

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
- c. Operasionalisasi nya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
- f. Diberi fasilitas oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)³⁷

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

³⁷Amalia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014

2. Tujuan dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, BUMDes memiliki tujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.³⁸

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipasi, emansipatif, transparansi akun tabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.³⁹

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga

³⁸KadekSumiasih, “Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4 Desember 2018, h.574

³⁹ Harry Kamaroesid, *Ibid*, h. 18-19

ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

3. Peranan BUMDes

Menurut Seyadi, indikator peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu⁴⁰ :

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai fondasi.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

4. Landasan Hukum BUMDes

Dalam mendirikan BUMDes dilandasi Undang-Undang sebagai berikut:

- a. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 87 ayat 1 “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”, ayat 2 “BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan”, ayat 3 “BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang

⁴⁰Seyadi, “*Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*”. (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), h. 16

ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

b. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah :

Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”

c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2005 tentang Desa :

Pasal 78 :

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum

Pasal 79

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
2. Permodalan Badan Usaha Milik Desa berasal dari :
 - a. Pemerintah desa
 - b. Tabungan masyarakat
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten atau Kota
 - d. Pinjaman
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil

3. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari pemerintah dan masyarakat

Pasal 80

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten atau kota.
2. Peraturan daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Bentuk badan hukum
 - b) Kepengurusan
 - c) Badan kewajiban
 - d) Permodalan
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan
 - f) Kerja sama dengan pihak ke tiga
 - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.⁴¹

5. Pengurus dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

⁴¹ZulkarnainRidlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes", jurnal Ilmu Hukum, vol. 7, No. 3, tahun 2013, hal. 357-359

- a. Penasihat
- b. Pelaksana Operasional
- c. Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu⁴²:

- a. *Kooperatif*, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Participative*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akun tabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative.
- f. *Sustainable*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh

⁴²Departement Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes*, 2007, hlm. 13

masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan omset dari dana BUMDes yang dikelola selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

6. Keuangan BUMDes

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Ke mendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa adalah merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDes 51% adalah

berasal dari desa, sedangkan sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

7. Pertanggung jawaban Pelaksanaan BUMDes

Pelaksana operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintah Desa bertanggungjawab akan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui MusyawarahDesa.

8. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Klasifikasi jenis usaha BUMDes menurut Harry Kamaroesid yaitu:⁴³

2) BUMDes *Banking*

BUMDES yang bertipe *Banking* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal sebelum hadir BUMDes tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDes itu sendiri lahir.”

3) BUMDes *Serving*

BUMDes *Serving* mulai tumbuh secara incremental di banyak Desa. Keterbatasan air bersih dan ketidak mampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDes atau PAM Des.

4) BUMDes *Brokering*

Sebelum ada BUMDes sebenarnya sudah ada banyak Desa yang menjalankan usaha Desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran rekening listrik, dan juga pasar Desa. Ini adalah bisnis sederhana,

⁴³Harry Kamaroesid, *Ibid*, h. 18-19

bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *captive market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam Desa sendiri.

5) BUMDes *Renting*

BUMDes *Renting* adalah BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama desa-desa yang ada di pulau Jawa. Contoh jenis usaha *renting* yaitu: penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah, toko, tanah maupun penyewaan mesin molen.

6) BUMDes *Trading*

BUMDes yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan terlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat.

9. Pembagian keuntungan

Pembagian hasil usaha BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha, pembagian keuntungan yang diberikan BUMDes jika sesuai peraturan yaitu 35% untuk pembangunan desa, 15% untuk pengurus, 45% untuk pengembalian modal dan 5% untuk sosial dari Sisa Hasil Usaha (SHU) selama satu tahun. Bagi hasil BUMDes dialokasikan untuk:⁴⁴

- a. Pendapatan desa
- b. Pemupukan modal usaha
- c. Pendidikan dan pelatihan pengurus
- d. Penasehat

⁴⁴ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) h.30

- e. Pengelola/direktur
- f. Kepala unit usaha dan karyawan
- g. Pengawas
- h. Dana cadangan

C. Kewirausahaan

1. Pengertian Kewirausahaan

Secara bahasa, wirausaha atau *entrepreneur* adalah suatu istilah yang berasal dari kata wira yaitu berani, perkasa, dan utama.⁴⁵ Sedangkan usaha yaitu kegiatan atau aktivitas yang mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud.⁴⁶ Menurut Bukhari Alma wirausaha atau *entrepreneur* adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut.⁴⁷ Jadi seorang wirausaha atau *entrepreneur* tidak selamanya seorang pedagang atau seorang *manager*, melainkan ialah orang yang unik yang terbawa berani mengambil risiko dan dia yang memperkenalkan produk inovatif dan teknologi baru ke dalam perekonomian.⁴⁸

Menurut Suryana (2001) kewirausahaan adalah suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif (menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda) yang dijadikan dasar, sumber daya, kiat dan proses menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian mengambil risiko. As'ad (2003) mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan dan sikap mandiri, kreatif, inovatif, ulet, berpandangan jauh ke depan, pengambilan risiko yang sedang dan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain dalam bidangnya atau masyarakat. Sedangkan menurut Hisrich et. al dalam Slamet et.al (2014:5)

⁴⁵ Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka, 1990. h. 1023.

⁴⁶ W.J.S. Powerdarminta, Kamus Umum BI (Jakarta; Balai Pustaka, 1983), h. 1136

⁴⁷ Bukhari Alma. Kewirausahaan (C et, VII; Bandung; Al Fabate, 2004), h.21

⁴⁸ Bukhari Alma. Kewirausahaan (C et, VII; Bandung; Al Fabate, 2004), h.23

kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki nilai dengan mengorbankan waktu dan tenaga, melakukan pengambilan risiko finansial, fisik, maupun sosial, serta menerima imbalan moneter dan kepuasan serta kebebasan pribadi.

Dalam definisi tersebut ditekankan bahwa wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sedangkan proses kewirausahaan adalah meliputi semua kegiatan fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang tersebut. Adapun kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya, dan intinya kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi suatu tantangan.

Dari segi karakteristik perilaku, wirausaha adalah mereka yang mendirikan, mengelola dan mengembangkan serta melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok yang pertama peluang dan kemampuan menanggapi peluang. Berdasarkan hal tersebut maka yang tepat untuk kewirausahaan adalah tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat tindakan serta membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif dan inovatif (Pekerti, 1997).

2. Ciri – Ciri Umum Kewirausahaan

Ciri-ciri kewirausahaan ada 8 yaitu;⁴⁹

⁴⁹Suryana, kewirausahaan; Pedoman praktis: kiat dan Proses Menuju Sukses, (Cet. 4, Jakarta; Salemba empat, 2008), h. 30-37.

- 1) Memiliki motif berprestasi tinggi. Seorang wirausaha selalu berprinsip bahwa yang dilakukan merupakan usaha optimal untuk menghasilkan nilai maksimal. Artinya, wirausaha melakukan sesuatu hal yang tidak asal-asalan, sekalipun hal tersebut dapat dilakukan oleh orang lain. Nilai prestasi merupakan hal yang justru membedakan antara hasil karya sebagai seorang wirausaha dengan orang lain yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan.
- 2) Memiliki perspektif masa depan. Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Setiap saat mencapai target, sasaran dan impian maka tambahkanlah dalam diri mimpi-mimpi baru yang dapat memacu serta member semangat dan antusiasme kepada kita untuk mencapainya.”
- 3) Memiliki kreativitas tinggi. Seorang umumnya memiliki daya kreasi dan inovasi yang lebih dan non-wirausaha. Hal-hal yang belum terpikirkan oleh orang lain sudah terfikirkan olehnya dan wirausaha mampu membuat hasil inovasi nya tersebut menjadi Permintaan.
- 4) Memiliki tanggung jawab. Ide dan perilaku seorang wirausaha tidak terlepas dari tuntunan tanggung jawab.
- 5) Memiliki kemandirian. Orang yang mandiri adalah orang yang tidak mengandalkan orang lain.
- 6) Memiliki keberanian. Seorang wirausaha harus berani menghadapi risiko. Selalu mencari peluang. Seorang wirausaha sejati selalu mampu melihat sesuatu dalam perfektif atau dimensi yang berlainan pada suatu waktu.
- 7) Memiliki jiwa kepemimpinan. Untuk dapat menggunakan waktu dan tenaga orang lain mengelola dan menumbuhkan bisnisnya, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan dan semangat untuk mengembangkan orang-orang di sekelilingnya. Memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial

seseorang dapat dilihat dari tiga kemampuan yaitu: kemampuan teknik, kemampuan pribadi/personal, dan kemampuan operasional.

- 8) Memiliki kemampuan personal. Semua orang yang berkeinginan untuk menjadi wirausaha harus memperkaya diri dengan berbagai keterampilan personal.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum BUMDes Lontar Sewu

1. Sejarah BUMDes Lontar Sewu

Gresik merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak potensi alam untuk dapat di kembangkan menjadi sebuah pariwisata. Pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Gresik memiliki arti yang sangat penting dan strategis karena sektor ini merupakan sektor unggulan yang nantinya diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah dengan cara usaha ekonomi daerah multi sektor, serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga secara tidak langsung digunakan sebagai jalan untuk mengenalkan Kabupaten Gresik lebih dikenal oleh masyarakat luas melalui pariwisata.

Desa Hendrosari yang gersang dan panas dan dahulu Desa Hendrosari dikenal oleh masyarakat dengan stigma buruk dikarenakan Desa tersebut menjadi salah satu produsen minuman tradisional tuak, yang dibuat dari buah siwalan di fermentasi. Oleh karena itu pemerintah desa mengubah stigma buruk terhadap Desa Hendrosari dengan memberdayakan masyarakat melalui Desa Wisata sehingga stigma masyarakat yang dahulu menganggap bahwa Desa Hendrosari sebagai desa penghasil legen atau tuak yang paling terkenal bisa digantikan dengan Desa Wisata yang sedang berkembang sekarang. Pengembangan desa wisata termasuk kedalam usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki citra ataupun menambah keunggulan dengan memanfaatkan potensi yang ada. Salah satu obyek wisata yang sangat berpotensi dan menarik pengunjung lokal di kawasan Gresik selatan pada awal tahun 2020 adalah Desa

Wisata Lontar Sewu di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Pertama kali dimunculkan karena adanya program PHBD dari KemenristekDikti tahun 2018.⁵⁰

Desa Hendrosari terletak di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan luas wilayah 192 Ha yang terbagi menjadi 2 dusun yaitu: Dusun Hendrosalam dan Dusun Hendrosari. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cerme Kecamatan Cerme, Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pandu Kecamatan Cerme, di Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Boboh Kecamatan Menganti. Jarak tempuh Desa Hendrosari ke ibu kota Kecamatan adalah 4 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.20 Jam, sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten adalah 14 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.75 jam.

Pada pengelolaan Edu Wisata Lontar Sewu dilaksanakan oleh BUMDes dimana mereka memberdayakan masyarakat sekitar untuk dapat langsung mengembangkan dan mempertahankan eksistensi tempat wisata tersebut. Dimana pengelola Edu Wisata Lontar Sewu adalah wajib warga Desa Hendrosari dan saat ini sekitar 30-60 orang ikut berpartisipasi mengelola tempat wisata. Setelah adanya Edu Wisata Lontar Sewu petani siwalan yang total nya 119 petani memiliki keuntungan dengan naiknya pendapatan mereka sekitar 2-3x lipat dari penghasilan sebelum adanya Edu wisata Lontar Sewu, juga dari adanya tempat wisata tersebut hingga saat ini terdapat sejumlah 103 UKM yang dapat mencari keuntungan dengan berjualan di sekitar area wisata.

⁵⁰ Assiyah, R. (2008). Potensi dan pengembangan wisata desa ngablak di sleman yogyakarta. Skripsi. Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Universitas Sebelas Maret

2. Visi dan Misi BUMDes Lontar Sewu

Visi:

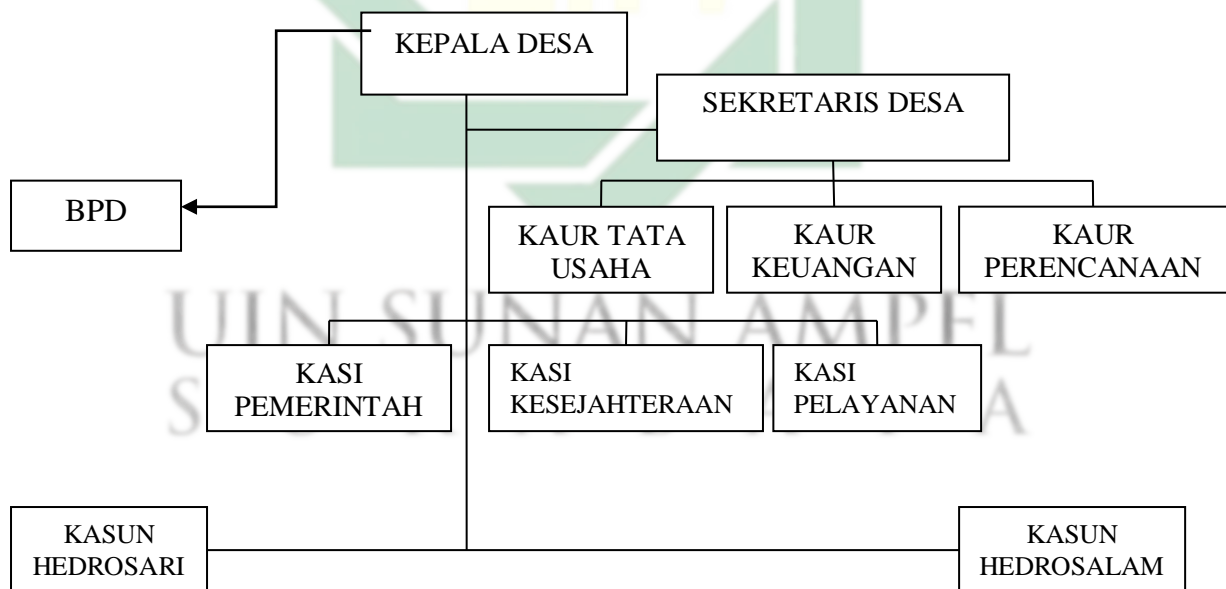
Membangun dan menata Desa dengan “TAMASA SEHARI” (Tertib, aman, amanat, dan sejahtera) menuju Desa Hendrosari Mandiri.

Misi:

- 1) Mewujudkan pembangunan di Desa yang tertib.
- 2) Mewujudkan kondisi desa yang aman, tertib dan kondusif.
- 3) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang amanat, jujur, transparan dan akuntabel.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 5) Mewujudkan Desa Hendrosari menjadi Desa Mandiri.

3. Struktur Organisasi BUMDes Lontar Sewu

Tabel 2. Struktur Organisasi BUMDes Lontar Sewu



Struktur Organisasi Pemerintah Desa Hendrosari:

Kepala Desa : H. Asna Hadi Seputro

Sekretaris Desa : Arifin, S.T

Kepala Urusan Umum & TU : EndySugito

Kepala Urusan Keuangan : Suwarni
Kepala Urusan Perencanaan : Sungkono
Kepala Divisi Pemerintahan : M. Arif Noveri
Kepala Divisi Kesejahteraan : H. Misdi, K.z
Kepala Divisi Pelayanan : Edi Supriyanto
Kepala Dusun Hendrosalam : Sunarlikan
Kepala Dusun Hendrosari : Askun

4. Data Kependudukan

Desa Hendrosari terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Hendrosari dan Dusun Hendrosalam. Total jumlah penduduk di Desa Hendrosari sejumlah 2176 jiwa. Mata Pencaharian penduduk yaitu wiraswasta, karyawan swasta, PNS, TNI dan POLRI, dll.

B. Pengelolaan BUMDes Lontar Sewu

Desa Hendrosari terkenal dengan pesona alamnya yang indah dan hijau dikarenakan di sana terdapat kebun pohon lontar yang luas, yakni sekitar 90 Hektar. Hal ini menjadikan Desa Hendrosari menjadi salah satu tempat wisata yang digemari oleh masyarakat. Salah satunya yaitu terdapat Edu Wisata Lontar Sewu. Asal mula nama Lontar Sewu atau dalam Bahasa Indonesia artinya Seribu Lontar, berasal dari banyaknya pohon lontar yang terdapat di sana. Sehingga hal ini menjadi keunikan tersendiri bagi wisata di Desa Hendrosari dan menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Desa Hendrosari. Ditambah dengan banyaknya wahana yang terdapat di dalamnya, seperti wahana bermain anak, wahana air, taman rumah unik, jajanan kuliner, fasilitas area santai keluarga, dan juga beberapa titik spot untuk berfoto. Selain Edu Wisata Lontar Sewu, Desa Hendrosari juga terkenal dengan kuliner nya. Luasnya kebun pohon lontar dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk diambil

buah dan sari buahnya menjadi sebuah produk makanan atau minuman khas Desa Hendrosari. Terdapat salah satu minuman khas Desa Hendrosari yang sangat terkenal, yaitu minuman Legen yang terbuat dari sari buah lontar yang difermentasi dan dipercaya dapat menjadi obat.

Masyarakat setempat yang memproduksi legen dan dijual di pasaran. Bahkan pembeli minuman ini sudah tidak hanya dari masyarakat kota Gresik saja, melainkan juga sudah dari berbagai daerah. Selain itu juga terdapat berbagai UKM yang menjual berbagai olahan sari buah lontar untuk dijual ke wisatawan. Beberapa contohnya yaitu, jelly drink, pentol saus legen, jamu, dan masih banyak lagi. Terdapat juga rumah makan yang menjual makanan-makanan khas dari Kota Gresik maupun Desa Hendrosari sendiri. Hal ini menjadikan banyak masyarakat Desa Hendrosari yang diuntungkan perekonomiannya dan merupakan peluang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Pembangunan Desa Wisata juga telah dijelaskan di dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 – 2025 Pasal 47 tentang Kriteria Desa Wisata, meliputi :

- 1) Mendorong pendapatan penduduk dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya.
- 2) Mendorong masyarakat berperan aktif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk desa wisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat.
- 3) Penyediaan fasilitas yang dimiliki masyarakat lokal untuk peningkatan pendapatan masyarakat setempat.
- 4) Mengembangkan sikap kewirausahaan masyarakat desa.

Dijelaskan juga mengenai Perwujudan Desa Wisata di Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 – 2025 Pasal 48, meliputi :

- 1) Memiliki keunikan, keaslian dan sifat khas
- 2) Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa
- 3) Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung
- 4) Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar maupun prasarana lainnya.

Desa Wisata di Hendrosari dikelola oleh BUMDes di Desa Hendrosari berdiri sejak tahun 2016. Tetapi pada tahun 2016, BUMDes Hendrosari belum ada kegiatan sama sekali. Kemudian pada tahun 2018 BUMDes memulai program awal dengan membuat sebuah program pengolahan sampah (TPST 3R). Sampah-sampah tersebut ternyata memberikan dampak yang baik untuk masyarakat maupun untuk BUMDes sendiri. Sampah tersebut dipilah-pilah untuk digolongkan sesuai dengan jenisnya. Yang pertama ada sampah plastik yang bisa dijual, akan dijual dan hasilnya akan masuk ke kas BUMDes. Kemudian yang kedua terdapat sampah organik yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Yang ketiga yaitu sampah yang tidak bisa diolah dan akan dibuang ke TPA. Program pengolahan sampah tersebut mendapatkan pujian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Program yang kedua yaitu mengenai program desa wisata. BUMDes berwenang untuk mengelolanya. Mulai dari manajemennya, operasionalnya, pembiayaannya yang juga akan dilaporkan ke Pemerintah Desa dan BUMDes terus melakukan pengembangan terhadap desa wisata tersebut. Program Desa Wisata ini merupakan program yang diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Desa pada tahun 2018 setelah

mereka berkunjung ke Desa Hendrosari. Yang kemudian juga pendanaannya dibantu oleh Kementerian Desa PDTT. Pada awal perencanaannya BUMDes juga ikut berperan bersama Pemerintah Desa dan juga masyarakatnya. Dan sekarang wisata tersebut sudah sukses, bahkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Program yang ketiga yaitu mengenai adanya gedung serba guna. Ini merupakan program baru yang dibuat oleh BUMDes Hendrosari. Fungsi dari gedung ini bisa bermacam-macam, baik untuk acara mau untuk tempat berolahraga. Tetapi saat ini gedung serba guna tersebut masih dalam proses pembangunan dan nantinya gedung tersebut akan disewakan untuk kepentingan warga ataupun lainnya. Program ini akan memberikan pemasukan tambahan untuk BUMDes Hendrosari.

Susunan Kepengurusan BUMDes:

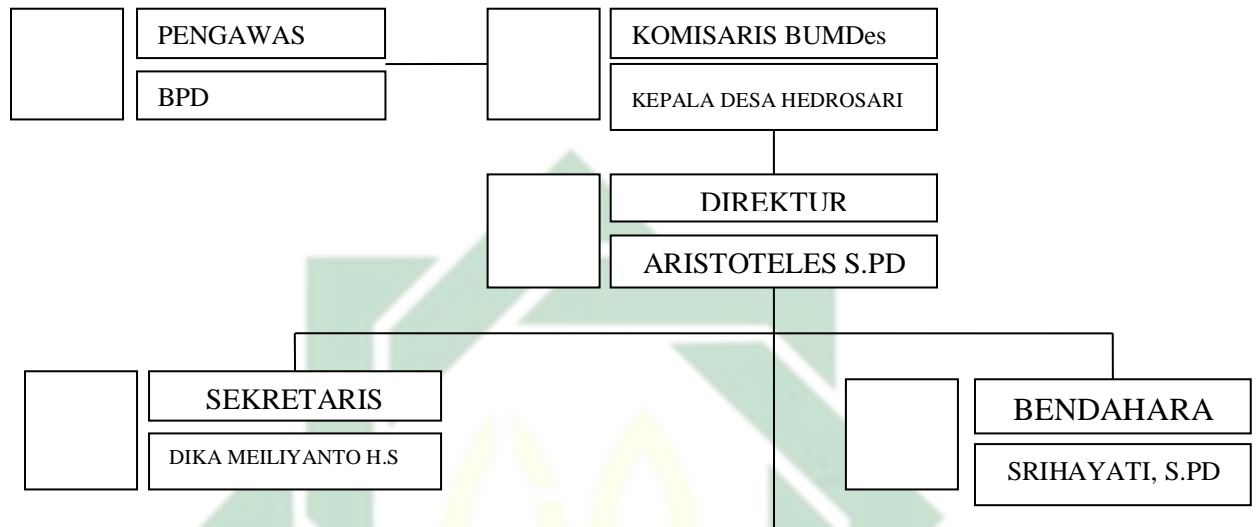
1. Komisaris BUMDes : H. Asno Hadi Seputro
2. Ketua BUMDes : Aristoteles, S.Pd
3. Sekretaris : Dika Meiliyanto H.S
4. Bendahara : Srihayati, S.Pd

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAGAN STRUKTUR

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

DESA HENDROSARI KEC. MENGANTI KAB. GRESIK



Sumber: Pemerintah Desa Hendrosari

Dalam melaksanakan kegiatan usaha tentu memerlukan adanya kerja sama yang baik untuk setiap unit kerja serta koordinasi diantara pengelola. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. BUMdes Lontar Sewu harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari jumlah wisatawan yang datang di Edu Wisata Lontar Sewu setiap harinya. Pencatatan transaksi keuangan adalah langkah awal yang untuk mencatat berbagai perubahan posisi keuangan dari sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis, dengan metode-metode tertentu sehingga hasil pencatatan dapat dikomunikasikan kepada pihak lainnya berupa laporan keuangan. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan. Dasar pencatatan akuntansi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembukuan Tunggal

Sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal (tidak berpasangan). Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem ini hanya memasukkan uangnya dipemasukan dan pengeluaran.

2. Pembukuan Berpasangan

Sistem pencatatan *doubleentry* juga sering disebut sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut terdapat sisi debit dan kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu asset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana.”

C. Pemaparan Hasil Penelitian

Pada bagian pemaparan hasil penelitian menjelaskan terkait temuan yang didapatkan peneliti selama melakukan kegiatan penggalian data, temuan tersebut berupa wawancara yang di kelompokkan dan di susun dalam rangka fokus pada rumusan masalah, oleh karenanya data akan lebih ditekankan untuk mampu menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian, berikut hasil penelitian yang diperoleh peneliti :

1. Sebelum adanya wisata Lontar Sewu

- a). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kutipan hasil wawancara :

“Dahulu kita pernah untuk melakukan pengelolaan pada Legen, yang dikembangkan menjadi komoditas lain seperti saus, permen, dan sari legen. Sehingga pelatihan dari BUMDes”

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan yang berbasis inovasi serta kreativitas dalam meningkatkan nilai tambah serta diferensiasi produk. Dalam mencapai tujuan dari pengelolaan Legen, sebelum adanya wisata Lontar Sewu menjelaskan bahwa BUMDes memberikan fokus yang besar dalam mengkaji Legen supaya mampu menjadi olahan produk lain dengan kualifikasi mampu bertahan lebih lama serta memiliki bentuk lain diluar minimum.

Kutipan dokumentasi pemberitaan⁵¹

"Dulu kalau orang datang ke sini pulang-pulang pasti mabuk setelah meminum tuak tersebut" kata Kepala Desa Hendrosari, Asna Hadi Saputra, Rabu.

Berdasarkan temuan data dokumentasi dari sebuah media pemberitaan yang menjelaskan terkait latar belakang wilayah Hendrosari serta potensi alam yang dimilikinya, dalam sebuah rilis berita bahwa Hendrosari sebagai wilayah yang memiliki pasokan Legen yang besar, pohon-pohon penghasil minuman itu banyak tumbuh serta dirawat sebagai penghasil komoditi perdagangan. Melalui data wawancara hingga temuan dokumentasi memiliki kesamaan, yang mana Legen menjadi menjadi komoditi unggulan di wilayah itu, oleh karena menjadi sesuatu yang rasional bila BUMDes menaruh perhatian besar kepada komoditi tersebut, sehingga pelatihan dan pengembangan komoditi beserta sumber daya manusia diperuntukan untuk menjadikan pasokan Legen yang besar diwilayahnya mampu

⁵¹ A. Malik Ibrahim, 'Lontar Sewu, dulu desa memabukkan kini jadi jujugan', *ANTARAJATIM* (Gresik, 12 Feb 2020), <https://jatim.antaranews.com/berita/351306/lontar-sewu-dulu-desa-memabukkan-kini-jadi-jujukan>, accessed 27 Mar 2022.

diserap oleh pasar, sehingga meningkatkan volume pembelian atas produk Legen dan turunannya, hingga berdampak pada pendapat dan perekonomian desa.

- b). Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Perekonomian Dan Desa Serta Ekonomi Wirausaha.

Kutipan hasil wawancara :

“Dahulu sebelum ada wisata, BUMDes berfokus pada pengelolaan Legen, akan tetapi karena komoditas tersebut tidak seberapa diminati, sedangkan pasokan banyak. Legen juga bukan komoditas yang tahan lama, hanya bertahan 3 jam dan setelah berubah menjadi Towak atau Legen basi”

Legen menjadi produk unggulan dari wilayah Hendrosari, faktor yang mempengaruhi perekonomian desa adalah faktor sumber daya alam berupa pohon penghasil Legen, kemudian faktor produk olahan dari Legen yakni Towak. Di masa sebelum wisata Lontar Sewu belum berdiri, peneliti tidak menemukan faktor lain yang mempengaruhi ekonomi masyarakat desa kala itu, peneliti menemukan bahwa faktor masyarakat merawat dan membudidayakan pohon Legen sebagai cara untuk mempertahankan kebutuhan secara finansial termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi ekonominya saat ini.

Kutipan dokumentasi pemberitaan⁵²

“Di salah satu desanya, yakni Desa Hendrosari, orang pada umumnya pasti mengenal sebagai desa memabukkan, karena di lokasi itu menjadi salah satu produsen minuman tradisional bernama tuak, yang dibuat dari buah siwalan difermentasi.”

⁵² *Ibid.*

Berdasarkan temuan data yang didapatkan peneliti menemukan fakta bahwa ada fenomena di masyarakat umum yang menyebutkan bila mana ada orang yang mencari Legen atau produk turunannya berupa Towak maka Hendrosari sebagai wilayah rekomendasi yang tersedia. Temuan ini sama secara makna dengan hasil wawancara di atas, kesamaannya menjelaskan bahwa wilayah Hendrosari secara ekonomi memiliki ketergantungan atau mayoritas perputaran keuangannya berasal dari Legen dan Towak, oleh karenanya menjadi sebuah faktor penggerak ekonomi bagi masyarakat terkait Legen dan turunannya.

c). Keadaan Ekonomi Masyarakat Lontar Sewu Desa Hendrosari

Kutipan wawancara

“Dahulu rata-rata pegawai sekarang pemilik usaha sendiri, bahkan ada masyarakat yang menjadi pengangguran serta ibu rumah tangga yang biasanya tidak banyak aktivitas di rumah sekarang bisa berjualan, kemudian menjadi karyawan di Lontar Sewu”

Berdasarkan data wawancara di atas menjelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat mayoritas bukan bergerak sebagai pedagang maupun pemilik suatu usaha, melainkan sebagai pegawai dahulunya, sedangkan untuk ibu-ibu berprofesi sebagai ibu rumah tangga biasa sehingga secara penambahan finansial bisa dikatakan tidak ada, disamping itu ada populasi pengangguran yang dimiliki oleh wilayah penghasil Legen tersebut.

Kutipan dokumentasi pemberitaan⁵³

“lahan desa seluas 192 hektare ditanami dengan banyaknya pohon siwalan yang tumbuh subur, dan ditata sedemikian rupa sehingga

⁵³ *Ibid.*

enak dipandang dan menjadi wisata desa yang mengandalkan tumbuhan dan buah siwalan nya Ada 2.600 pohon yang tumbuh di sini.”

Berdasarkan pada hasil temuan dokumentasi yang dimiliki peneliti menjelaskan bahwa mayoritas penduduk desa Hendrosari adalah berprofesi sebagai petani, oleh karenanya UKM tidak berkembang secara pesat di wilayah tersebut. Temuan ini memiliki kesamaan makna dengan hasil wawancara di atas, yang mana menjelaskan bahwa masyarakat sebelum adanya Lontar Sewu sebagai petani, namun setelah adanya Lontar Sewu seakan menjadi kesempatan untuk menjadi pemilik usaha atas tokonya sendiri.

2 Sesudah adanya wisata Lontar Sewu

- a). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kutipan hasil wawancara :

“Setelah ada pelatihan dan wisata, perubahan yang terjadi Legen menjadi komoditas yang laris diminati karena padatnya pengunjung menjadikan pasokan kurang mencukupi permintaan pasar.”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes adalah dengan melalui pelatihan kepada sumber daya manusianya supaya mampu dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan tepat, dan BUMDes menyediakan lokasi untuk warga desa untuk dapat menyalurkan kemampuan, memiliki pendapatan serta memiliki kesempatan dalam mengembangkan usahanya sendiri.

Kutipan hasil wawancara :

“seluruh karyawan yang bekerja di Lontar Sewu harus memiliki kartu keluarga yang beralamatkan Hendrosari, sehingga seluruh karyawan murni dari warga desa sendiri, untuk jumlah

karyawan sudah mencapai 109 orang. Selain dari itu, untuk pemberdayaan masyarakat, ada UKM yang beroperasi di wisata Lontar Sewu harus berasal dari warga desa, untuk jumlah UKM nya ada 103”

Proses pemberdayaan lainnya yang dilakukan oleh BUMDes adalah dengan menetapkan kebijakan yang bersifat memberdayakan warga sekitar sebagai sumber daya manusia, oleh karenanya peran BUMDes sangat besar dalam menjadi lembaga yang mampu memaksimalkan kemampuan wilayahnya serta potensi, termasuk mengelolah sumber daya manusianya sehingga dampak wisata ikut dirasakan oleh warga dalam berbagai profesi.

b). Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Perekonomian Dan Desa Serta Ekonomi Wirausaha.

Kutipan hasil wawancara :

“dari proposal ini pemerintah daerah mendapatkan 1,3 miliar rupiah dari Kementerian Desa di tahun 2019, pada tahun 2020 kita laksanakan soft opening untuk wisata di Lontar Sewu, dan untuk resmi berdirinya pada 9 Februari 2020”

Faktor pertama yang mempengaruhi perekonomian desa menurut temuan peneliti adalah dari segi pemodalannya, karena melalui pemodalannya ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga dialokasikan dalam berbagai sektor, yang salah satunya adalah wisata Lontar Sewu. Melalui wisata tersebut menjadikan masyarakat memiliki berbagai peluang bagus, dimulai dari lapangan pekerjaan hingga kesempatan untuk menjadi pedagang serta potensi pengunjung yang memberikan stimulus positif terhadap pembelian produk di wilayah Hendrosari serta pendapatan desa.

Kutipan hasil wawancara :

“Jadi BUMDes kita ada 3 unit usaha, yakni pertama ada TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu), wisata Lontar Sewu yang murni dikelola BEMDes, dan Gedung serba guna atau dikenal dengan gedung Siwalan (untuk kegiatan olah raga dan pertemuan)”

Faktor lain yang mempengaruhi perekonomian desa adalah adanya pengembangan usaha, yang tidak hanya pada wisata melainkan mendirikan TPST dan gedung serba guna, yang mana hal tersebut menjadi sumber ekonomi lain serta sumber penyerapan tenaga kerja lokal selain wisata. Oleh karena semakin banyak pengembangan serta sektor usaha yang dibuka, maka semakin memperbesar peluang desa untuk memperoleh pendapatan dari usaha yang dikelola BUMDes.

“Ini disebabkan oleh kemandirian yang dimiliki oleh masyarakat”

Dari data di atas bahwa faktor yang mempengaruhi ekonomi desa terdiri dari keaktifan pengelola BUMDes dalam mengikuti berbagai informasi serta memanfaatkan dengan baik kesempatan untuk memperoleh pemodal, kedua adalah dukungan modal dari pemerintah pusat yang menjadikan BUMDes mampu untuk mewujudkannya ke dalam berbagai bentuk program baik di wisata maupun di sektor lain, ketiga adalah strategi pengembangan wisata yang dilakukan oleh BUMDes yang melalui perencanaan serta eksekusi yang baik mampu menjadikan wisata dikenal serta didatangi oleh orang termasuk mempublikasikan sisi menarik dari sektor usahanya, keempat adalah partisipasi masyarakat yang mampu untuk aktif serta memiliki upaya untuk mengembangkan wilayahnya sehingga BUMDes memiliki dukungan dari masyarakat sekitar yang memudahkannya dalam menjalankan setiap langkah penting di dalam keputusannya, kelima adalah BUMDes memiliki analisis yang baik sehingga mampu menjadikan wisata memiliki daya jual kepada masyarakat umum, dan

keenam adalah BUMDes mampu untuk menjadikan lembaganya memiliki banyak sektor usaha sehingga pendapatan desa tidak hanya wisata melainkan ada sektor lain yang mampu memberikan pemasukan kepada desa.

- c). Keadaan Ekonomi Masyarakat Lontar Sewu Desa Hendrosari Pasca Adanya Desa Wisata

Kutipan hasil wawancara :

“Alhamdulillah, berdasarkan kabar yang ada menunjukkan peningkatan dibandingkan sebelum adanya wisata Lontar Sewu, rata-rata yang berjualan di wisata ini adalah ibu-ibu rumah tangga, sedangkan untuk yang pria masih bekerja di tempatnya semula. Secara peningkatan di atas 40%, Jadi secara kesejahteraan masyarakat meningkat dari sebelum adanya wisata.”

Berdasarkan data wawancara di atas menjelaskan bahwa keadaan ekonomi setelah adanya wisata Lontar Sewu mengalami peningkatan, sehingga masyarakat mendapatkan dampak baik atas adanya wisata di wilayah mereka, melalui wisata menjadikan pengangguran mampu memperoleh lapangan kerja yang diperuntukan untuk mengakomodasi warga desa dalam menjadi bagian operasional serta pengembangan wisata, selain itu ibu rumah tangga mampu membantu keuangan keluarga melalui kegiatan produktifnya di wisata yang berasal dari kegiatan jual-beli di wisata.

Kutipan hasil wawancara :

“Untuk tingkat pendidikannya rata-rata Sekolah Menengah Atas, untuk karyawan banyak yang masih kuliah, sehingga mereka bekerja sambil kuliah. Maka secara pendidikan mengalami peningkatan.”

Dari data wawancara yang telah didapatkan oleh peneliti di atas menjelaskan mengenai kondisi ekonomi yang membaik menjadikan kualitas pendidikan, dan pembelajaran pun ikut meningkat. Para warga desa bahkan banyak putra-puterinya yang masih kuliah dan bersekolah mampu menghasilkan uang sembari belajar, dari pekerjaannya di Lontar Sewu para remaja tersebut juga mampu untuk menambah atau bahkan menjadikan upah yang diterimanya sebagai salah satu sumber pembiayaan pendidikannya

Kutipan hasil wawancara :

“Ada perubahan dari kewirausahaan masyarakat yang dahulu tidak bisa berjualan, kini bisa berjualan di Lontar Sewu, sehingga dahulu rata-rata pegawai sekarang pemilik usaha sendiri, bahkan ada masyarakat yang menjadi pengangguran serta ibu rumah tangga yang biasanya tidak banyak aktivitas di rumah sekarang bisa berjualan, kemudian menjadi karyawan di Lontar Sewu, bahkan yang masih sekolah kita mengajak untuk bergabung sebagai freelance, yang kita beri ilmu dan arahan mulai dai menjadi operator, di cafe, dan banyak lainnya, yang mana ketika unit usaha berjalan maka menjadi pemasukan untuk BUMDes sendiri”

Perubahan kondisi ekonomi terjadi kepada para penduduk, yang mana warga sekitar kini memiliki status ekonomi sebagai pengelola serta pemilik atas usahanya sendiri. Kondisi ekonomi tidak hanya pada status saja, melainkan dengan adanya wisata menjadikan salah satu terobosan dari BUMDes dalam membuka lapangan pekerjaan bagi warga Hendrosari, lapangan pekerjaan ini turut membantu mengurangi hingga menghilangkan angka pengangguran di wilayah

tersebut, bahkan remaja yang masih sekolah bisa merasakan dampaknya dari besarnya lapangan pekerjaan yang diperuntukan untuk warga sekitar.

Kutipan hasil wawancara :

“Untuk pendapatan kira-kira kurang lebih dalam sebulan mendapatkan 1 miliar, untuk gaji karyawan kita mengalokasikan 115 juta dalam sebulan, dengan rata-rata gaji 2 juta rupiah.”

Hasil wawancara lain menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dari wisata yang dihitung oleh BUMDes mencapai hingga angka 1 miliar rupiah, angka tersebut adalah pendapatan dari wisata selama satu bulan. Gaji yang dikeluarkan setiap bulan mencapai 115 juta rupiah dengan rata-rata gaji sebesar 2 juta rupiah, hal tersebut menunjukkan kondisi ekonomi akibat adanya wisata menguatkan ekonomi warga desa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS DATA

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan agar dapat menghasilkan perubahan di masyarakat terhadap sektor perekonomian, sosial dan budaya. Telaah yang dijelaskan sebelumnya bahwa peneliti akan membahas mengenai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes untuk meningkatkan ekonomi kewirausahaan (studi kasus: BUMDes lontar sewu) dengan Proses pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan 3 informan yang terdiri dari:

1. Kepala Desa Hendrosari.
2. Ketua Badan Usaha Milik Desa Hendrosari.
3. Masyarakat Desa Hendrosari yang terlibat.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan terkait mengenai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes untuk meningkatkan ekonomi kewirausahaan (studi kasus: BUMDes lontar sewu):

1. Sebelum adanya wisata Lontar Sewu

- 1) Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan temuan data yang dimiliki oleh peneliti, menjelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes sebelum adanya wisata Lontar Sewu dengan melakukan kajian kepada sumber daya yang dimiliki yakni Legen, kemudian melakukan pelatihan dalam membuat produk turunan dari Legen yang memiliki daya tahan lebih baik dan mampu meningkatkan nilai beli, dan BUMDes menggerakkan masyarakat untuk aktif dalam meningkatkan perekonomian desa melakukan kegiatan inovasi dan kreativitas produk.

Tindakan dari BUMDes sesuai dengan teori dari Robert dan Johnson bahwa melalui pelatihan memberikan pengetahuan hingga keterampilan yang spesifik

melalui identifikasi pekerjaan yang saat ini tengah dijalankan⁵⁴. Melalui teori tersebut peneliti memahami bahwa pelatihan sebagai keharusan dalam menciptakan kemajuan di masyarakat, dengan pelatihan maka menjadi proses untuk orang mendapatkan kapabilitas dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah dicanangkan oleh organisasi.

Ayon menjelaskan dalam teori bahwa pelatihan memiliki sebuah tujuan yang diperuntukan untuk memperbaiki penguasaan dari berbagai macam keterampilan hingga teknik pelaksanaan kerja yang spesifik dalam rangka memenuhi kebutuhan saat ini⁵⁵. Dalam teori ini, bila mana peneliti mengkajinya dengan masa sebelum ada wisata, maka BUMDes melatih warga desa dengan memiliki visi dan misi yang ingin diraih. Visi dan misi tersebut berhubungan dengan meningkatkan nilai beli Legen, serta diferensiasi produk dalam memperluas pangsa pasar serta memanfaatkan peluang pasokan Legen yang tersedia dalam jumlah yang besar.

Sebelum adanya wisata Lontar Sewu, faktor yang mempengaruhi perekonomian warga desa adalah penjualan Legen dan produk turunannya Towak, hal tersebut didasarkan pada sumber daya berupa tanaman penghasil minuman tersebut tersedia sangat banyak di wilayah Hendroasri, dan menjadikan masyarakat sekitar memanfaatkannya sebagai komoditi utama yang diperjualbelikan, dalam hal tersebut memperlihatkan bahwa faktor yang mempengaruhi peningkatan ekonomi desa saat itu hanya pada transaksi jual-beli Legen dan turunannya, pemanfaatan pohon penghasil legem, dan fermentasi dari minuman Legem.

⁵⁴ Robert L. Mathis and John H. Jockson, *Human Resource Management*, 10th edition (Jakarta: Salemba Empat). Hlm 301

⁵⁵ Ayon Triyono, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1st edition (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004). Hlm 41

2) Keadaan Ekonomi Masyarakat Lontar Sewu Desa Hendrosari Pra Adanya Desa Wisata.

Keadaan ekonomi dari masyarakat kala itu memperlihatkan data bahwa penghasilan masyarakat mayoritas berasal dari Legen dan turunannya, adanya populasi pengangguran pada wilayah tersebut, masyarakat tidak semua mengenal dan memiliki bahkan mampu mengelolah usaha miliknya sendiri, mayoritas adalah pekerja dari sebuah perusahaan atau usaha milik orang lain, ibu-ibu rumah tangga yang dianggap memiliki waktu lebih banyak di rumah sehingga sebenarnya memiliki peluang untuk mengalokasikan waktu pada kegiatan produktif.

Tri Winarti dalam teorinya menjelaskan bahwa pemberdayaan yang sebenarnya adalah mengantarkan kepada proses kemandirian, pengembangan, dan memperkuat potensi⁵⁶. Dalam situasi sebelum wisata Lontar Sewu berdiri, masyarakat masih memiliki ketergantungan kepada pekerjaan di luar wilayahnya atau pada satu komoditi unggulan saja yakni Legen, sedangkan sektor usaha lain tidak nampak pada kegiatan masyarakat, untuk pengembangan masih kurang dikarenakan dahulu warga desa hanya mengandalkan Legen sebagai komoditi jual-beli utama, dan dalam aspek potensi yang dimiliki sebenarnya BUMDes telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan nilai tambah dalam olahan Legen akan tetapi mengalami penjualan masih dirasa kurang memuaskan, sedangkan secara potensi sumber daya manusia masih tidak terserap dengan baik, yang ditunjukkan dengan adanya pengangguran hingga ibu-ibu rumah tangga yang sebenarnya mampu menjadi produktif namun karena tidak memperoleh kesempatan, pada akhirnya sumber daya yang ada tidak terserap dengan baik.

⁵⁶ Tri Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21* (Yogyakarta: Aditya Media, 1998). Hlm 68

Todaro menjelaskan dalam teorinya bahwa pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masyarakat, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan serta daya serap suatu wilayah terhadap angkatan kerjanya yang masih produktif⁵⁷. Bila mana peneliti mengkaitkannya dengan temuan selama penelitian, maka Hendrosari sebelum adanya wisata hanya bergantung pada usaha turun menurun dari generasi ke generasi yang membudidayakan pohon Lontar serta melakukan perdagangan pada produk yang dihasilkan tanaman tersebut. Maka secara daya serap angkatan kerja produktif hanya bergantung pada bisnis Legen, dan alokasi perdagangan komoditi tersebut hanya berupa perdagangan minuman saja tanpa adanya sektor lain yang mampu saling menopang sehingga sumber pendapatan utama tidak hanya satu, sehingga daya serap angkatan kerja produktif mampu dilakukan secara maksimal.

Menurut Smith bahwa sumber daya alam yang tersedia dan tidak dipergunakan dengan maksimal akan mempengaruhi penduduk dan permodalan⁵⁸, dalam teori tersebut menunjukkan bahwa tindakan dari BUMDes sudah sejalan dengan teori yang ada. BUMDes menyadari akan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam yang maksimal sehingga mampu dijadikan sebagai keunggulan dari wilayahnya, dan memberikan dampak bagi penduduk dan permodalan, hal tersebut terbukti dengan diberikannya pemodalannya dari pemerintah pusat kepada BUMDes untuk mendirikan wisata Lontar Sewu.

⁵⁷ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, 8th edition (Jakarta: Erlangga, 2004). Hlm 48

⁵⁸ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 4th edition (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999). Hlm 156

2. Sesudah adanya wisata Lontar Sewu

1) Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes

BUMDes dalam mengembangkan wisata untuk menjadikannya sebagai destinasi serta kawasan padat pengunjung, fakta temuan selama penelitian menunjukkan bahwa pelatihan serta penanaman pemahaman bersama terkait pentingnya wisata dikelola bersama-sama.

Langkah yang ditempuh oleh BUMDes selaras dengan teori yang disampaikan oleh Justin, Carlos dan William yang mana menjelaskan bahwa melalui pelatihan menjadikan sumber daya manusia meningkat secara kualitas, menjadikan sumber daya manusia memiliki kemampuan serta kapabilitas baru yang pasti dibutuhkan di masa mendatang, seluruh elemen sumber daya manusia memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan serta wawasan, dan menjadikan sumber daya manusia menjadi terlibat dalam perumusan wacana-wacana baru yang secara konstruktif dan terencana yang memberikan dampak positif bagi keberlanjutan dan masa depan⁵⁹.

Berdasarkan teori tersebut, pelatihan yang diadakan dalam menyambut penyelenggaraan wisata diperuntukan untuk keberlanjutan dan masa depan dari wisata, melalui sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan setiap fungsi yang dibutuhkan dalam mengoperasikan wisata, maka BUMDes bersama warga desa mampu menjadikan wisata Lontar Sewu memiliki daya tarik dan pendapatan besar hingga saat ini. Dengan melibatkan warga desa dalam mempersiapkan wisata, menjadi dampak positif bagi warga desa dan

⁵⁹ Justin G., Carlos W. Moore, and J. William, *Kewirausahaan*, 4th edition (Jakarta: Salemba Empat, 2001). Hlm 519

BUMDes, yang mana warga desa kini memperoleh kesempatan dagang di wilayah mereka sendiri atas produk unggulan yang dimiliki kemudian lapangan pekerjaan yang tersedia baik untuk warga desa.

Pemberdayaan dalam bentuk selain pelatihan dari BUMDes kepada warga desa adalah karyawan yang bekerja pada sektor usaha BUMDes adalah warga desa sendiri, serta yang berdagang di area wisata juga berasal dari warga sekitar.

Tri Winarti menjelaskan bahwa pemberdayaan sejatinya adalah usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya⁶⁰, dan menurut peneliti bahwa hal yang dilakukan oleh BUMDes adalah upaya untuk memberikan daya kepada warga desa untuk mampu mengembangkan potensi wilayahnya serta kemampuannya dalam mengelola maupun berdagang di area wisata, sehingga secara kemampuan warga desa memiliki kesempatan dan tempat untuk berkembang menjadi lebih baik lagi

BUMDes memanfaatkan peluang yang ada untuk memperoleh perbantuan modal dari pemerintah pusat melalui kementerian desa, yang mana permodalan ini mengantarkan BUMDes untuk menjalankan sektor usahanya termasuk wisata Lontar Sewu, Gedung Siwalan, dan TPST, selain itu keaktifan warga desa menjadikan program dapat terelaborasi dengan baik dan tepat sehingga mengantarkan sektor usaha salah satunya Lontar Sewu menjadi destinasi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat umum.

Todaro menjelaskan bahwa modal digunakan untuk memperbesar output di masa mendatang⁶¹, pada tindakan yang dilakukan oleh BUMDes sudah tepat sesuai dengan teori, yang mana menggunakan modal dalam mengembangkan sektor usaha baru yakni Lontar Sewu yang menjadi perpuatan ekonomi yang

⁶⁰ Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21*. Hlm 69

⁶¹ Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Hlm 27

besar bagi warga sekitar, dimulai dari pendapatan dari UKM yang ada, pendapatan parkir, pendapatan dari tiket masuk, pendapatan dari wahana dan banyak lainnya, bahkan dalam mengenalkan produk Legen serta turunannya bisa menjadi komoditi yang diminati oleh masyarakat umum saat ini dibandingkan dengan sebelum adanya wisata.

2) Keadaan Ekonomi Masyarakat Lontar Sewu Desa Hendrosari Pra Adanya Desa Wisata Dan Pasca Adanya Desa Wisata.

Peneliti menemukan fakta bahwa semenjak berdirinya wisata Lontar Sewu memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat, yang mana keadaan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan menjadikan ekonomi warga menjadi membaik, bahkan meningkat 40%. Dalam peningkatan ekonomi yang terjadi, peningkatan kualitas pendidikan pun itu terasa, yang mana remaja yang masih bersekolah dan berkuliah dapat bekerja di wisata, sehingga secara keuangan sekolah atau bahkan uang operasional pendidikan, remaja desa Hendrosari dapat melakukan pembiayaan secara mandiri. Peningkatan ekonomi juga berdampak kepada menurunnya pengangguran, terbukanya lapangan pekerjaan yang besar, adanya wisata membantu dalam mengurangi kemiskinan, wisata membantu wilayah untuk berkembang menjadi produktif secara sumber daya manusia, dan menjadikan warga desa mengenal dunia bisnis melalui kegiatan usaha yang diakomodasi di area wisata Lontar Sewu.

Dalam teori Gunawan bahwa pemberdayaan sebagai tindakan sosial ada organizer yang baik ketika membuat perencanaan dan tindakan kolektif, dalam rangka memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan

kemampuan serta sumber daya yang dimiliki⁶². Berdasarkan teori ini, maka BUMDes telah berhasil mengantarkan warga desa untuk keluar dari permasalahan wilayahnya terkait pengangguran, perekonomian yang bergantung hanya pada Legen, ibu rumah tangga yang tidak produktif dan banyak lainnya, pencapaian tersebut dicerminkan dalam meningkatnya taraf hidup melalui kondisi ekonomi wilayah yang dikatakan meningkat di atas 40 persen, dari perencanaan yang baik menjadikan wisata sebagai salah satu lokasi bagi warga untuk memperoleh pendapat, menjadi wirausahawan, dan mendapatkan pekerjaan.

Menurut Mardikanto dan Soebiato bahwa proses pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan, dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup⁶³. Teori tersebut memberikan penjelasan alasan yang membuat BUMDes Hendrosari mampu mengembangkan kegiatan usaha wisata Lontar Sewu, hal tersebut dikarenakan partisipasi warga desa yang mana dengan keaktifannya membuat perbaikan pada kualitas hidup, dan perbaikan kualitas hidup warga tercermin dari meningkatnya kondisi ekonomi warga menjadi lebih baik dari sebelumnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶²Adisaputro, Gunawan, (2014) *Manajemen Pemasaran Untuk Perancangan Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Hlm 102

⁶³ Totok Mardikanto and Soebianto Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes sebelum wisata Lontar Sewu adalah dengan berfokus pada pelatihan dan pengembangan produk dari Legen menjadi memiliki turunan lain seperti permen dan lainnya. Sedangkan setelah wisata Lontar Sewu ada pemberdayaan dilakukan dengan tetap melaksanakan pelatihan serta pengembangan dalam rangka menyiapkan sumber daya yang dimiliki, menerapkan kebijakan bahwa karyawan dan pedagang berasal dari warga desa sehingga optimalisasi sumber daya menjadi fokus lembaga desa, produk desa menjadi komoditi terus diutamakan sebagai unggulan dari wisata Lontar Sewu.
2. Keadaan ekonomi masyarakat lontar sewu desa Hendrosari, ketika sebelum adanya wisata Lontar Sewu bahwa kondisi desa memiliki populasi pengangguran, ibu rumah tangga tidak memiliki kegiatan produktif, masyarakat tidak mengenal kegiatan wirausaha, dan warga desa tidak banyak yang menjadi pemilik usaha. Sedangkan setelah wisata Lontar Sewu ada memunculkan perubahan yakni terbukanya lapangan kerja yang luas, peningkatan kondisi ekonomi yang membaik bahkan naik, warga mengenal kegiatan wirausaha, warga memiliki lapak dagangan sendiri, pendapatan tidak hanya berasal dari komoditi Legen, tingkat pendidikan menjadi membaik dikarenakan pemuda-pemudi daerah diajak untuk ikut menjadi bagian dari karyawan pengelola wisata Lontar Sewu.

B. Saran

Melihat potensi yang bisa dikembangkan kembali melalui potensi setiap wilayah, maka sebaiknya wilayah Hendrosari dijadikan sebagai lokasi percontohan bagi wilayah di Gresik lainnya, melalui pelatihan di wilayah yang sudah memiliki bukti keunggulan, akan menjadikan proses berbagai ilmu akan semakin lebih muda dan cepat, maka wilayah di Gresik lain bisa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang menjadi layak desa wisata atau desa dengan pendapatan yang tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Ibrahim, 'Lontar Sewu, dulu desa memabukkan kini jadi jujukan', *ANTARAJATIM* (Gresik, 12 Feb 2020), <https://jatim.antaranews.com/berita/351306/lontar-sewu-dulu-desa-memabukkan-kini-jadi-jujukan>, accessed 27 Mar 2022.
- Adisaputro, Gunawan, (2014) *Manajemen Pemasaran Untuk Perancangan Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Amalia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa", *Journal of Rural and Development* Volume V No. 1 Februari 2014
- Andreas, dkk, *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial*, (Medan: Raja Garuda, 2016)
- Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa*, (2015) Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Arida I. S., & Punjani, L. K. (2017). "Kajian penyusunan kriteria-kriteria desa wisata sebagai instrumen dasar pengembangan desa wisata". *Jurnal analisis pariwisata* Vol. 17 No. 1
- Assiyah, R. (2008). *Potensi dan pengembangan wisata desa ngablak di sleman Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Universitas Sebelas Maret
- Bukhari Alma (2004). *Kewirausahaan* (Cetakan, VII; Bandung; Alfabeta)
- Cidir Ali, (2005) *Badan Hukum*, Bandung, PT: Citra
- Deny Nofriansyah, (2018) "*analisis kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan*". Yogyakarta: Dee publish.
- Edi Suharto, (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Darwanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 13, tahun 2016.
- Emzir. *Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif*, Cetakan ke 9.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah, (2010) *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fitria. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. *Adl Islamic Economic*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2020
- Frinces, Heflin. (2004). "*Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis*". Yogyakarta: Darussalam
- Haris Herdiansyah, (2013) *Wawancara, observasi, dan fokus group's sebagai instrumen penggalan data kualitatif*, Jakarta: Raja Graf indo persada.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Salemba Humanika
- Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, (Jakarta: Bappenas, 2000)
- Husaini Usmani, (2009) *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi aksara.
- Irawan Soeharto, (2011) *Metode penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetakan ke-8.
- Khoirul Amin. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Melalui Industri Sabut Kelapa*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.
- Khoriddin, (1992) *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebiato (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Maryunani, (2008) "*Pembangunan BUMDes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*", Bandung: CV. Pustaka Setia.
- PERMEN Desa No. 22 Tahun 2016, *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*

- Raharjo, Budi. (2019) Pemrograman Android dengan Flutter. Bandung: INFORMATIKA
- Renstra (Rencana Strategis) tahun 2019, “Direktorat Jenderal Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”
- Soemarno (2010) Bahan kajian untuk MK. Ekonomi Sumber daya Alam. PDIP PPS FPUB
- Soetomo, (2014) Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwantoro, Gamal. (2004). Dasar-dasar pariwisata. Penerbit Andi Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto (2002), Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Bandung: Alfabet.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Zubaedi, (2007) “Wacana Pengembangan Alternatif”, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Zaili Rusli, (2012) “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Progam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam”, Pekanbaru: Universitas Riau.
- Zainuddin Ali, (2011) Metode penelitian Hukum, Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke-3.
- Kadek Sumiasih, “Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4 Desember 2018, h.574
- Seyadi, “Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa”. (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003)
- Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDes”, jurnal Ilmu Hukum, vol. 7, No. 3, tahun 2013
- Departement Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes*, 2007
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka, 1990.
- W.J.S. Powerdarminta, Kamus Umum BI (Jakarta; Balai Pustaka, 1983),
- Suryana, kewirausahaan; Pedoman praktis: kiat dan Proses Menuju Sukses, (Cet. 4, Jakarta; Salemba empat, 2008),
- Robert L. Mathis and John H. Jockson, *Human Resource Management*, 10th edition (Jakarta: Salemba Empat).
- Ayon Triyono, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1st edition (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Tri Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21* (Yogyakarta: Aditya Media, 1998).
- Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, 8th edition (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 4th edition (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999).
- Justin G., Carlos W. Moore, and J. William, *Kewirausahaan*, 4th edition (Jakarta: Salemba Empat, 2001).
- Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21*.
- Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*.
- Totok Mardikanto and Soebiato Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013).